



RENCANA KERJA TAHUN 2016

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
2016**





JL. ASIA AFRIKA NO. 146 BANDUNG – JAWA BARAT
TELEPON (022) 4230897 – 4230898
FAX (022) 4200331 – 4230929

Email : disperindag@jabarprov.go.id
Website : www.disperindagjabarprov.go.id



INDAG
J A B A R

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Khadirat Allah S.A.W. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016, berpedoman kepada **RENSTRA** Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 2014-2018 yang telah diselaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 25 Tahun 2014 tentang RPJMD Jawa Barat 2014-2018, kepada Pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, dan berpedoman kepada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 050/02/Bapp tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Penyusunan RENJA OPD Provinsi Jawa Barat. Prosesnya diawali dengan evaluasi dan pembahasan internal khususnya yang berhubungan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, selanjutnya diselaraskan dengan hasil Raker Kementerian Perindustrian dan Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan.

Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan urusan industri dan perdagangan, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis saat ini dan sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Jawa Barat maupun instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri dan perdagangan di Jawa Barat.

Dalam Renja 2016 terdapat Program/Kegiatan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan dukungan dana APBD Jawa Barat, sebagian besar diarahkan untuk melaksanakan janji Gubernur yang telah tertuang dalam RPJMD Jabar 2014-2018 dan prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat berdampak kepada menciptakan lapangan kerja/menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini menuntut

kepiawaian seluruh unsur pimpinan untuk melakukan inovasi, kreativitas dan terobosan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas dapat dicapai sesuai dengan tahapan yang ditentukan.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2016 sebagian besar memuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya lanjutan tahun sebelumnya disamping yang bersifat tematik sesuai dengan pembahasan di Bappeda Jabar dan diharapkan dapat memberikan pedoman operasional bagi aparatur Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada unit kerja masing-masing di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparatur pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsinya.

Bandung, Mei 2015

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT



Dr Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19621121 198909 1 001

DAFTAR – ISI

	Hal.
Pengantar	i
Daftar isi	iii
 Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
 Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN 2013	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2014 dan Capaian Renstra Dinas	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas	II-37
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas	II-82
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat	II-91
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-106
 Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas.....	III-11
3.3. Program dan Kegiatan	III-12
 Bab IV PENUTUP.....	IV-1

LAMPIRAN

1. Daftar Usulan Kegiatan Penelaahan Masyarakat
2. Hasil Forum OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
3. Pendapatan Retribusi Balai Pengelolaan Kemetrolagian Karawang, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon dan Balai Pengembangan Perindustrian Tahun 2014.
4. SK. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat No. 800/1128/Skrt Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja tahun 2016.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan tahunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada tahun 2016, perencanaan ini disusun sebagai pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Demikian pula halnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat 2016 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Rencana Kerja ini pun merupakan kolaborasi dari sistem perencanaan pembangunan Tahunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan hasil proses panjang pada kesepakatan program dan kegiatan mulai dari penyelenggaraan Forum OPD, pra Musrenbang di 5 (lima) wilayah sampai dengan Musrenbang Provinsi Jawa Barat di Hotel Horison beberapa waktu lalu. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya pun turut berkontribusi terhadap penyusunan program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana disebutkan, Tahun 2016 merupakan pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018, oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat merupakan hasil evaluasi dari pencapaian kinerja RPJMD dan Rencana Kerja yang disusun akan memberikan landasan yang kuat untuk melanjutkan pentahapan pembangunan bidang industri dan perdagangan di Jawa Barat.

Pentahapan pembangunan bidang industri dan perdagangan tersebut dirumuskan berdasarkan isu strategis yang berkembang pada setiap wilayah yang ada disesuaikan dengan upaya penanganan masalah berdasarkan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Program utama di Bidang Perindustrian yaitu pada pengembangan klaster prioritas (Klaster Industri Alas Kaki, Klaster Industri Komponen Suku Cadang, Klaster Industri Fashion, Klaster Industri Makanan dan Minuman, Klaster Industri Telematika dan Klaster Industri Kreatif), pengembangan IKM unggulan di Kab./Kota yg berbasis kompetensi inti daerah maupun kompetensi inti provinsi. Program utama di bidang perdagangan adalah pengembangan sistem Perdagangan Dalam Negeri, Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Pengembangan ekspor daerah dan promosi ekspor. Dengan senantiasa meningkatkan daya saing industri pengolahan dan skema perdagangan yang tertata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mendorong indeks daya beli yang pada akhirnya akan berujung pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2015;
 19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 142 Seri D);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

28. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1269-Org/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Stándar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah mewujudkan industri dan perdagangan yang berdayasaing tinggi melalui pembagian peran secara proporsional antara berbagai stakeholder terkait dari Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kab./Kota), Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga, Asosiasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah untuk :

- 1) Mewujudkan pentahapan pembangunan industri dan perdagangan yang kokoh dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan urusan industri dan perdagangan baik antar Pusat, Provinsi dan Kab.Kota di Jawa Barat;
- 3) Mengoptimalkan peran Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas urusan Industri dan Perdagangan.
- 4) Memanfaatkan potensi sumber daya Industri dan Perdagangan di Jawa Barat secara efisien dan efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan penganggaran tahunan yang meliputi urusan industri dan perdagangan di Jawa Barat. Adapun sistematika penulisan Renja Indag adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2016, didalamnya memuat prioritas pengembangan urusan industri dan perdagangan.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2016.

1.3. Maksud Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2016.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi Renja yang ingin dituju berdasarkan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan perencanaan yang akan dilaksanakan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperindag Jabar Tahun 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Disperindag Jabar.

Menjelaskan realisasi hasil capaian program dan kegiatan Dinas Perindag yang direncanakan dalam Rencana Kerja tahun 2014 dan

pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2014 serta evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian Renstra, baik realisasi yang memenuhi target maupun yang belum atau tidak memenuhi target beserta faktor penyebabnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Menjelaskan implikasi yang timbul terhadap capaian indikator kinerja program dan kegiatan serta kebijakan/ tindakan perencanaan / penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas.

Menjelaskan implikasi yang timbul dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, termasuk koordinasi Program dan Kegiatan baik dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dinas yang membidangi Industri dan Perdagangan di Kab./Kota di Jawa Barat serta stakeholder lainnya yang terkait dalam pembinaan Industri dan Perdagangan di Jawa Barat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Menjelaskan review rancangan awal RKPD tahun 2015 melalui pendekatan Common Goals Tematik serta Kewilayahan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Industri dan Perdagangan Nasional.

Menjelaskan arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Perdagangan Nasional, sebagai bahan sinergitas kegiatan pembinaan Industri dan Perdagangan di Jawa Barat agar terwujud sinkronisasi pembiayaan (APBN/APBD) dalam pelaksanaan pembinaan industri dan perdagangan di Jawa Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disperindag Jabar.

Menjelaskan hubungan Visi dan Misi Dinas Perindag Prov. Jabar dengan tujuan dan sasaran Rencana Kerja tahun 2016.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan rincian prioritas program dan kegiatan Rencana Kerja tahun 2016 serta indikator capaian masing-masing program dan kegiatan termasuk pagu indikatifnya.

BAB IV Penutup

Menguraikan rangkuman tentang hal-hal pokok yang termuat dalam dokumen Renja 2016 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan kebijakan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Disperindag Jabar.

Evaluasi capaian indikator sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Pengukuran kinerja Sasaran Strategik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat meliputi pencapaian sasaran masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Kualifikasi
1.	Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar.	Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat	166.52 Triliun Rupiah	166.52 Triliun Rupiah	100	Baik
		Peningkatan Jumlah unit usaha IKM	201.955	201.997	100.02	Sangat Baik
2.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi	Peningkatan Nilai Produksi IKM	5%	712,36%	14247	Sangat Baik
3.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri	Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	1500 Org	1445	96.33	Baik

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Kualifikasi
		Peningkatan Jumlah wirausaha baru	3000	1375	45.83	Kurang
4.	Meningkatnya produk ekspor non migas. eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	2%	1,92%	96.5	Baik
		Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	75	203	270	Sangat Baik
		Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	2%	2,78%	139	Sangat Baik
5.	Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan	Jumlah revitalisasi pasar tradisional	15 Unit	19 Unit	126.66	Sangat Baik
		Jumlah kerjasama perdagangan	5 Buah	1 Buah	20	Sangat Kurang
6.	Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk	Terkendalinya inflasi Jawa Barat	< Inflasi Nasional (8,36%)	7,14%	100	Baik
		Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.151 buah	79	Cukup
			BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	Cukup
7.	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	50 %	50%	100	Baik

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Kualifikasi
8.	Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan	Tingkat keterlambatan pelaporan	4%	0%	100	Baik
9.	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis	25 PNS	25 PNS	100	Baik
RATA-RATA PENCAPAIAN SASARAN					986.58	Baik sekali

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah 986.58. Dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar itu maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori dengan kinerja **"Sangat Baik"**.

Evaluasi dan analisis terhadap hasil pengukuran sasaran stratejik yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Meningkatkan perkembangan industri kecil, menengah dan besar.

Industri kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu segmen industri yang dapat dijadikan tumpuan dalam penciptaan iklim wirausaha yang dapat menyerap tenaga kerja. IKM sudah terbukti ketangguhannya dapat bertahan terhadap terpaan badai krisis ekonomi periode pra-reformasi tahun 1997-1998 karena memiliki fleksibilitas dan elastisitas yang tinggi. Karakteristik inilah yang memberikan andil cukup signifikan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh yang bercirikan kerakyatan.

Berdasarkan hal tersebut. maka peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah menjadi salah satu sasaran dalam pengukuran kinerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan. Capaian sasaran yaitu Meningkatnya Penyebaran Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Daerah Kab/Kota dengan indikator Jumlah wirausaha industri kecil dan menengah. Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah di targetkan meningkat sebesar 201.955 dari kondisi awal (2013) sejumlah 245.234 Unit Usaha. Adapun realisasinya menjadi 201.997 unit usaha sehingga peningkatannya sebesar 100,02%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Dinas terhadap IKM baik berupa fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan lainnya sudah memberikan hasil yang optimal terhadap pertumbuhan IKM di Jawa Barat.

2) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi.

Teknologi yang membuat industri menjadi lebih efisien, produktif dan inovatif. Kemajuan sektor industri sangat ditopang oleh peran ilmu pengetahuan dan berkesinambungan dan memiliki daya saing agar bisa berkompetisi di era global dan pasar bebas. Untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi industry, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya melalui program-program dan kegiatan yang dialokasikan baik melalui dana APBD maupun dana APBN.

Pada APBD fasilitasi peningkatan teknologi bagi industri menekankan pada industri kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi, industri kulit dan produk kulit, industri garam. Selain itu diberikan pula layanan kemasan bagi produk IKM. Pada standarisasi produksi dilakukan melalui sertifikasi halal bagi IKM. Berdasarkan hal tersebut dan nilai investasi pada pertumbuhan IKM, capaian sasaran Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi dengan indikator Peningkatan Jumlah fasilitasi standarisasi Industri dari target peningkatannya sebesar 5% dari kondisi awal (2013) sebanyak 481.56 juta rupiah, realisasinya sangat memuaskan mencapai 712,36% atau senilai 343.032 juta rupiah.

3) Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri salah satu penunjangnya adalah kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku industri yang cukup tersedia di dalam negeri khususnya di Provinsi Jawa Barat. Apalagi dikaitkan dengan pasar global serta dalam mengantisipasi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana tidak ada batasan lagi antara sesama negara di kawasan ASEAN baik untuk barang, jasa, tenaga kerja dan yang lainnya, khususnya untuk mengantisipasi masukannya tenaga kerja terampil dibidang Industri dari luar negeri dan untuk meningkatkan daya saing produk industri Jawa Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya melalui program-program dan kegiatan yang dialokasikan baik melalui dana APBD maupun dana APBN untuk meningkatkan Kemampuan dan keterampilan pelaku usaha dibidang industri serta penumbuhan wirausahawan baru.

Peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha bidang industri dibuktikan dengan peningkatan jumlah SDM IKM yang bersertifikat. Pada tahun 2014, sertifikat SDM diberikan pada kelompok industri industri keramik dan gerabah; industri otomotif; industri minuman berbasis kopi, teh dan coklat; industri agribisnis berbasis buah; industri kreatif berbasis fashion; industri rotan dan furniture non rotan; industri kreatif berbasis makanan olahan serta industri makanan.

Penumbuhan wirausahawan baru sebanyak 1445 wirausaha meliputi kelompok industri igerabah; industri batu mulia; industri makanan; industri elektronika; industri kertas; industri alat-alat industri pertanian serta konveksi.

Berdasarkan hal tersebut. maka capaian sasaran Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri dengan indikator :

- Peningkatan Jumlah wirausaha baru dari target 3.000 WUB dengan realisasi 1445 WUB. hal ini belum sesuai dengan target dikarenakan keterbatasan alokasi dana.

- Peningkatan Jumlah SDM IKM terlatih dari target sebesar 10% dari kondisi awal (2013) sebanyak 925 perusahaan. realisasi peningkatannya sebesar 45.83% atau sebanyak 1375 perusahaan. Hal ini sudah sesuai target.

4) Meningkatnya produk ekspor non migas. eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat

Perkembangan transaksi ekspor menunjukkan dinamika perekonomian suatu wilayah dan mengisyaratkan daya saing kemampuan produk suatu wilayah dalam persaingan global. Untuk itu salah satu sasaran strategis dinas adalah Meningkatnya produk ekspor non migas. eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat. Dengan Indikator sasaran adalah :

- Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun, dengan target peningkatan 2% dari kondisi awal (2013) nilai ekspor Jawa Barat sebesar US\$ 25.82 Miliar. yang terealisasi peningkatannya sebesar 1.92% (yoy) atau sebesar nilai US \$ US\$ 26.32 milyar Miliar. Hal ini sudah sesuai melebihi target.
- Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun. dengan target sebesar 75 eksportit realisasi 203 eksportir. hal ini sudah melebihi target yang ditentukan sebesar 270%.
- Penurunan Nilai Impor Jawa Barat. ditargetkan untuk tahun 2014 sebesar 2% realisasi 2.78% sehingga penurunan nilai impor sebesar 139% melebihi target yang telah ditentukan.

Salah satu upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian indikator tersebut adalah dengan melaksanakan 1). kegiatan Peningkatan Promosi Ekspor dan Perluasan Pasar. 2.) Peningkatan Daya Saing Ekspor dan 3). Pengembangan Jasa Perdagangan dan Industri Kreatif (TKW – 44). Hingga saat ini kawasan tujuan ekspor terbesar Jawa Barat masih didominasi ke kawasan Asia dan kawasan Amerika.

5) Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan dan jumlah kemitraan perdagangan yang terjalin antara pelaku usaha ditentukan oleh indikator sasaran yaitu :

- Jumlah sarana perdagangan (pasar rakyat, toko swalayan, dan gudang).

Sarana perdagangan dalam bentuk pasar rakyat, Toko swalayan dan gudang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan/atau jasa. Penggunaan produk dalam negeri dan ketersediaan bahan pokok masyarakat. Dalam upaya peningkatan ketersediaan sarana perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan salah satunya melalui kegiatan Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian sasaran jumlah revitalisasi pasar tradisional yang memadai, dari target 15 unit dengan realisasi 19 unit atau sebesar 126,6%. Hal ini sudah memenuhi target.

- Jumlah kerjasama perdagangan, ditargetkan sebesar 5 buah dengan realisasi 1 buah kerjasama atau sebesar 20%. Kerjasama perdagangan meliputi komoditi barang strategis dan kebutuhan pokok masyarakat berupa beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam dan daging sapi.

6) Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk

Dalam upaya pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat bukan hanya tugas pemerintah provinsi melainkan tanggung jawab bersama baik dengan kabupaten/kota, Asosiasi dan pelaku usaha dibidangnya. Hal ini diperlukannya koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok masyarakat atau

permasalahan lain yang berakibat mempengaruhi harga kepokmas. Seperti dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), terjadinya bencana banjir yang menghambat distribusi kepokmas dan faktor cuaca yang berpengaruh kepada produksi komoditas kepokmas seperti cabai yang harganya terus meningkat. Dari permasalahan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan salah satunya kegiatan adalah Dukungan Operasi Pasar Murah (OPM) KEPOKMAS. dengan target sasaran 15 Kab./Kota realisasi 15 Kb./Kota sehingga capaiannya 100%.

Indikator sasaran dari meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk yaitu jumlah UTTP dan BDKT. dimana :

- Jumlah UTTP dari target sebesar 6.181.265 buah dengan realisasi 4.923.151 buah sehingga capaiannya sebesar 79%. hal ini belum memenuhi target dikarenakan :
 - Potensi UTTP dari perusahaan pembuat meteran listrik yang berada diwilayah kerja Kemetrolagian Karawang tidak terpenuhi sesuai target karena kebijakan PLN dan Asosiasi tentang pemerataan pemenang tender.
 - Kurangnya pelaksana pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP di Masyarakat seperti di pasar tradisional sehingga diduga masih banyaknya penggunaan UTTP yang belum ditera
- Jumlah BDKT dari target sebesar 3.348 buah dengan realisasi 1.005 buah sehingga capainnya sebesar 65%. ini belum memenuhi target dikarenakan kurangnya monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan pengguna BDKT.

7) Meningkatnya sarana dan prasarana kerja

Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek paling penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengadaan sarana dan prasarana yang

memadai sangat mendukung aktifitas kegiatan yang sedang berjalan dalam suatu instansi. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu instansi pemerintah perlu mengadakan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dalam mencapai sasaran. Adapun salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan perdagangan dengan indikator sasaran Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal. target sebesar 50% dengan realisasi 50% sehingga capaiannya 100%.

8) Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan

Sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan merupakan sarana untuk memudahkan membuat program/kegiatan yang direncanakan suatu instansi/OPD dan mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan salah satunya melalui kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan Perdagangan. dengan indikator sasaran Tingkat keterlambatan pelaporan. target 4% dengan realisasi 0% maka capaiannya 100%.

9) Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia

Dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan indikator sasaran tingkat keikutsertaan pelatihan teknis. target sebanyak 25 PNS dengan realisasi 25 PNS maka capaiannya 100%.

Dalam rangka pendukungan terhadap pengembangan industri prioritas pada wilayah pengembangan industri Jawa 1 yang meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat fokus pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Cilegon-Serang-Tangerang dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang. Program/kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembebasan Tanah untuk Pusat Pelatihan Industri TPT di Majalengka.

Dari hasil evaluasi indikator sasaran Renja Tahun 2014 selanjutnya disandingkan dengan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2015, seperti yang terdapat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Restra sampai dengan Tahun 2015
Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2015			Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan Kegiatan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2015	
							Target Renja OPD Tahun 2014	Realisasi Renja OPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Urusan Wajib								
2	07	29		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sinergitas Perencanaan dan pelaporan	80%	70%	70%	70%	100	75%	100
2	07	29	01	Rapat Koordinasi Industri dan Perdagangan per wilayah	Jumlah pelaksanaan dalam satu tahun	4 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali	100	4 Kali	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	29	02	Forum OPD Disperindag kab/Kota se- Jawa Barat	Jumlah Dinas Kab./Kota yang terlibat	27 Kab./Kota	27 Kab./Kota	27 Kab./Kota	27 Kab./Kota	100	27 Kab./Kota	27 Kab./Kota	100
2	07	29	03	Prolegda Sertifikasi Halal	Terlaksananya Prolegda Sertifikasi Halal	-	-	-	-	-	1 Perda	1 Perda	100
2	07	36		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	15.000	0	3.000	1.375	45.83	6.000	2.375	39.58
2	07	36	01	Pencetakan 100.000 Wirausahawan Baru	Jumlah Wirausaha baru yang dilatih	15.000	0	3.000	1.375	45.83	6.000	2.375	39.58
2	07	59		Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	70	N/A	50	50	100	55	55	100
2	07	59	01	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur	Keikutsertaan dalam pelatihan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tupoksi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	07	60	01	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrolagian Karawang	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
2	07	60	02	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrolagian Cirebon	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
2	07	60	03	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrolagian Bandung	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
2	07	60	04	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindag Prov. Jabar	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	60	05	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrollogian Tasikmalaya	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
2	07	60	06	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrollogian Bogor	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
2	07	60	07	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengembangan Perindustrian	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
2	07	61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sapras kerja aparatur sesuai standar daerah	80%	80%	80%	80 %	100	80%	80%	100
2	07	61	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrollogian Bogor	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrollogian Cirebon	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	61	03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Karawang	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	04	Sertifikasi Pembaharuan ISO 9001 dan Seritikasi KAN	Jumlah sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	100%	100%	100
2	07	61	05	Pengadaan Alat-alat Laboratorium Balai Kemetrolgian Karawang	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	06	Renovasi Mess Balai Kemetrolgian Tasikmalaya	Jumlah sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	100%	100%	100
2	07	61	07	Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Balai Tasikmalaya	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Jabar	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	09	Renovasi Gedung Kantor Dekranasda	Jumlah sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	100%	100%	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	61	10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrollogian Bandung	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Sub Unit IKM TPT Majalaya	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	13	Sarana dan Prasarana Dekranasda	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Baperin dan Sub Unit	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	15	Pembangunan Pos Satpam di Sub Unit Pengembangan IKM Logam Bandung, Logam Bogor dan Rotan Cirebon	Jumlah sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	100%	100%	100
2	07	61	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Mess Sub Unit PIKM Kerajinan Tasikmalaya	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	61	17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Mess Sub Unit PIKM Logam Sukabumi	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Mess Sub Unit PIKM Perkulitan Garut	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Mess Sub Unit PIKM Rotan Cirebon	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	20	BIJB-Persiapan Pembangunan Gedung Pelatihan Garmen di Kabupaten Majalengka	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	61	21	Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Balai Kemetrollogian Tasikmalaya	Jumlah sarana dan prasarana	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemeliharaan Saprasi Operasional Dinas/UPTD	95%	90%	90%	90%	100	92%	92%	100
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	62	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekranasda Provinsi Jawa Barat	Jumlah sarpras aparatur yang dipelihara	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	62	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jabar	Jumlah sarpras aparatur yang dipelihara	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	62	03	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Balai Kemetrollogian Cirebon	Jumlah sarpras aparatur yang dipelihara	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	62	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrollogian Bogor	Jumlah sarpras aparatur yang dipelihara	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	62	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrollogian Karawang	Jumlah sarpras aparatur yang dipelihara	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	62	06	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrollogian Tasikmalaya	Jumlah sarpras aparatur yang dipelihara	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	62	08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrollogian Bandung	Jumlah sarpras aparatur yang dipelihara	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	62	09	Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Bangunan Kantor BAPERIN dan Sub Unit	Jumlah sarpras aparatur yang dipelihara	85%	60%	65%	65%	100	70%	70%	100
2	07	66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	07	66	01	Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah dokumen yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
2	07	79		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rasio pengguna informasi	70%	60%	60%	60%	100	65%	65%	100
2	07	79	01	Pendataan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah kabupaten/kota yang didata	27 Kab/Kota	12 Kab/Kota	26 Kab/Kota	26 Kab/Kota	100	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	100
				Urusan Pilihan									
2	07	91		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat	207.31 Triliun Rupiah	157.64 Triliun Rupiah	166.52 Triliun Rupiah	166.52 Triliun Rupiah	100	175.89 Triliun Rupiah	175.89 Triliun Rupiah	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Peningkatan Jumlah unit usaha IKM	203.955 Unit Usaha	201.455 Unit Usaha	201.955 Unit Usaha	201.997 Unit Usaha	100.02	202.455 Unit Usaha	202.455 Unit Usaha	100
					Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
					Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	4.000 Org	500 Org	1.500 Org	1.445	96.33	2.500 Org	2.500 Org	100
2	07	91	01	Pendataan Perusahaan di sekitar Daerah Aliran Sungai	Peningkatan Jumlah unit usaha IKM	203.955 Unit Usaha	201.455 Unit Usaha	201.955 Unit Usaha	201.997 Unit Usaha	100.02	202.455 Unit Usaha	202.455 Unit Usaha	100
2	07	91	02	Sosialisasi Produksi Bersih untuk IKM	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	03	Intensifikasi Sosialisasi HKI	Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	4.000 Org	500 Org	1.500 Org	1.445	96.33	2.500 Org	2.500 Org	100
2	07	91	04	Uji Kompetensi Produk Binaan ITP, Bordir Jabar (Jabar Ngagaya)	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	05	Pengembangan Kemasan bagi IKM	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	91	06	Kerjasama Industri Produk atau Jasa	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	07	Pengembangan Industri Pakan Ternak di Wilayah IV. Priangan	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	08	Pengembangan Industri Makanan Olahan Berbasis Bahan Baku Lokal di Wil II	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	09	Pengembangan Kawasan Kampung Kreatif di Kab, Tasikmalaya	Peningkatan Jumlah unit usaha IKM	203.955 Unit Usaha	201.455 Unit Usaha	201.955 Unit Usaha	201.997 Unit Usaha	100.02	202.455 Unit Usaha	202.455 Unit Usaha	100
2	07	91	10	Diseminasi Pengembangan Kemasan Jawa Barat	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	11	Pelayanan Mobil Kemasan bagi IKM	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	12	Peningkatan Layanan IKM di Lingkungan Sub Unit	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	13	Pengembangan Batu Mulia	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	15.000	0	3000	1375	45.83	6.000	2.375	39.58
2	07	91	14	Pengembangan Desain Genteng di Kabupaten Sukabumi	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	15.000	0	3000	1375	45.83	6.000	2.375	39.58

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	91	15	Sosialisasi dan Koordinasi Perkembangan Industri Kreatif Jawa Barat	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	16	Pengembangan Jaringan Kerjasama Industri Pelaku kreatif dalam Negeri maupun Luar Negeri	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	17	Pengembangan Kemitraan Industri Besar dengan IKM Kreatif	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	18	Penyelenggaraan Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	91	19	Dukungan Sertifikasi Halal Produk IKM Jawa Barat	Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	4.000 Org	500 Org	1.500 Org	1.445	96.33	2.500 Org	2.500 Org	100
2	07	91	20	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha di Lingkungan Sub Unit Pengembangan IKM	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	91	21	BIJB - Kajian Potensi Pengembangan Industri di Ciayumajakuning	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92		Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
					Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	4.000 Org	500 Org	1.500 Org	1.445	96.33	2.500 Org	2.500 Org	100
					Peningkatan Jumlah wirausaha baru	15.000	0	3000	1375	45.83	6.000	2.375	39.58
2	07	92	01	Pelatihan Pembuatan Sepatu	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	02	Pengujian Garam Beryodium di Tingkat Produsen garam beryodium	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	03	Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pelaku IKM Logam dan Mesin	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	92	04	Pengembangan CPPOB/GMP	Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	4.000 Org	500 Org	1.500 Org	1.445	96.33	2.500 Org	2.500 Org	100
2	07	92	05	bimbingan Teknis Desain dan Teknik Produksi Meubeul	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	06	Pengembangan pusat desain rotan cirebon	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	07	Pelatihan Manajemen Perusahaan Olahan pangan	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	08	Bimbingan Teknis Produk Olahan Pangan Berbasis Kopi, Teh dan Coklat	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	09	Pelatihan Bidang Electronika dan Telematika	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	15.000	0	3000	1375	45.83	6.000	2.375	39.58
2	07	92	10	Bimtek Desain Kemasan Produk olahan pangan bebrbasis buah	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	11	Bimtek Diversifikasi Produk Olahan Pangan Berbasis Buah	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	92	12	Bimbingan Teknis Standarisasi Mutu Produk Olahan Pangan Berbasis buah	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	13	Pelatihan Tekstil dan Produk Tekstil	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	14	Bimbingan Teknis dan Monitoring ke Lapangan	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	15	Pelatihan Teknologi Penyamakan Kulit	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	16	Pelatihan Teknologi Produksi Garam Krosok dengan Sistem Intensifikasi (Ramsol)	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	17	Bimbingan Teknis Standarisasi Mutu Olahan Pangan Berbasis Produk Peternakan	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	18	Pengembangan Pemanfaatan Limbah Kertas	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	15.000	0	3000	1375	45.83	6.000	2.375	39.58

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	92	19	Bimbingan Teknis Standarisasi Mutu Produk Olahan Pangan Berbasis Perikanan	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	20	Pelatihan Desain Keramik dan Gerabah (Tematik Kewilayahan)	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	21	GCB-Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat Sekitar DAS Citarum	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	92	22	Pelatihan Kerajinan Kaca, Kelom Geulis yung Geulis, Anyaman dan Bambu	Peningkatan Nilai Produksi IKM	25%	481.56 Juta Rupiah	5%	712,36%	14.247	10%	10%	100
2	07	93		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah revitalisasi pasar tradisional	35 Unit	12 Unit	15 Unit	19 Unit	126.66	20 Unit	20 Unit	100
					Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	6	60
					Terkendalinya inflasi Jawa Barat	< Inflasi Nasional	9,15%	< Inflasi Nasional (8,36%)	7,14%	100	< Inflasi Nasional	< Inflasi Nasional	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	93	01	Kerjasama Perluasan Pasar IKM Provinsi Jawa Barat dengan provinsi lainnya	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	02	Kemitraan Antar Pelaku Usaha	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	03	Pelatihan Manajemen Ekspor dan Impor Ikan Hias	Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	175 Eksportir	1.481 Eksportir	75 Eksportir	203 Eksportir	270	100 Eksportir	100 Eksportir	100
2	07	93	04	Partisipasi Pameran Ikan Hias	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	05	Monitoring Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG)	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	06	Simulasi Pasar Lelang Komoditi Agro Provinsi Jawa Barat	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	07	FGD Pengembangan Pasar Lelang	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	08	Identifikasi Peserta Pasar Lelang	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	09	Inter-Koneksitas Pasar Lelang Forward	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	10	Identifikasi Monitoring dan Evaluasi Revitalisasi Pasar Tradisional Jawa Barat	Jumlah revitalisasi pasar tradisional	35 Unit	12 Unit	15 Unit	19 Unit	126.66	20 Unit	20 Unit	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	93	11	Partisipasi Pada Pameran INACRAFT	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	12	Pameran Dagang Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	13	Pengembangan Usaha Bagi Pedagang	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	14	Pembinaan Bagi Distributor Beras	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	15	Uji Kompetensi Kemasan Beras	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	16	Sosialisasi Operasi Pasar Murah (OPM) KEPOKMAS	Terkendalnya inflasi Jawa Barat	< Inflasi Nasional	9,15%	< Inflasi Nasional (8,36%)	7,14%	100	< Inflasi Nasional	< Inflasi Nasional	100
2	07	93	17	Dukungan Operasi Pasar Murah (OPM) KEPOKMAS	Terkendalnya inflasi Jawa Barat	< Inflasi Nasional	9,15%	< Inflasi Nasional (8,36%)	7,14%	100	< Inflasi Nasional	< Inflasi Nasional	100
2	07	93	18	Supervisi Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) KEPOKMAS	Terkendalnya inflasi Jawa Barat	< Inflasi Nasional	9,15%	< Inflasi Nasional (8,36%)	7,14%	100	< Inflasi Nasional	< Inflasi Nasional	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	93	19	Fasilitasi Informasi Harga Kepokmas	Terkendalinya inflasi Jawa Barat	< Inflasi Nasional	9,15%	< Inflasi Nasional (8,36%)	7,14%	100	< Inflasi Nasional	< Inflasi Nasional	100
2	07	93	20	Fasilitasi Pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	21	Partisipasi Pameran Produk Jawa Barat	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	93	22	Pembinaan dan penataan Pasar Tradisional	Jumlah revitalisasi pasar tradisional	35 Unit	12 Unit	15 Unit	19 Unit	126.66	20 Unit	20 Unit	100
2	07	93	23	Bimbingan Tekhnis Bagi Pengelola Pasar Tradisional	Jumlah revitalisasi pasar tradisional	35 Unit	12 Unit	15 Unit	19 Unit	126.66	20 Unit	20 Unit	100
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	93	24	Pengembangan Kemitraan Ritel Modern dan IKM	Jumlah kerjasama perdagangan	25 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	20	10	10	100
2	07	94		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	4%	25,82 Milyar US\$	2%	1,92%	96.5	2%	2%	100
					Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	175 Eksportir	1.481 Eksportir	75 Eksportir	203 Eksportir	270	100 Eksportir	100 Eksportir	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	3%	12,23 Milyar US\$	2%	2,78%	139	2%	2%	100
2	07	94	01	Misi Dagang ke Wilayah Asia Timur	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	4%	25,82 Milyar US\$	2%	1,92%	96.5	2%	2%	100
2	07	94	02	COACHING PROGRAMME	Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	175 Eksportir	1.481 Eksportir	75 Eksportir	203 Eksportir	270	100 Eksportir	100 Eksportir	100
2	07	94	03	Monitoring Ekspor Hasil Tanhut	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	4%	25,82 Milyar US\$	2%	1,92%	96.5	2%	2%	100
2	07	94	04	Pelatihan Negosiasi Bisnis dan Kontrak Dagang Ekspor Hasil Tanhut	Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	175 Eksportir	1.481 Eksportir	75 Eksportir	203 Eksportir	270	100 Eksportir	100 Eksportir	100
2	07	94	05	Penyusunan Data Base Ekspor Hasil Tanhut	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	4%	25,82 Milyar US\$	2%	1,92%	96.5	2%	2%	100
2	07	94	06	Penilaian Kepatuhan atau (Post Audit) Terhadap Importir Jawa Barat	Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	3%	12,23 Milyar US\$	2%	2,78%	139	2%	2%	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	94	07	Pelatihan Manajemen Ekspor Produk Tanhut	Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	175 Eksportir	1.481 Eksportir	75 Eksportir	203 Eksportir	270	100 Eksportir	100 Eksportir	100
2	07	94	08	Monitoring Pemegang Angka Pengenal Impor	Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	3%	12,23 Milyar US\$	2%	2,78%	139	2%	2%	100
2	07	94	09	Sosialisasi Kebijakan Impor	Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	3%	12,23 Milyar US\$	2%	2,78%	139	2%	2%	100
2	07	94	10	Pelatihan Korespondensi, Negosiasi dan Kontrak Penjualan Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan	Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	175 Eksportir	1.481 Eksportir	75 Eksportir	203 Eksportir	270	100 Eksportir	100 Eksportir	100
2	07	94	11	Identifikasi Eksportir Produk Hasil Industri dan Pertambangan	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	4%	25,82 Milyar US\$	2%	1,92%	96.5	2%	2%	100
2	07	94	12	Forum Kinerja Ekspor Jawa Barat	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	4%	25,82 Milyar US\$	2%	1,92%	96.5	2%	2%	100
2	07	94	13	Petunjuk Pasar Ekspor ke Negara Non Tradisional (Amerika Latin dan Afrika)	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	4%	25,82 Milyar US\$	2%	1,92%	96.5	2%	2%	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	94	14	Monitoring Ekspor Produk Hasil Industri dan Pertambangan	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	4%	25,82 Milyar US\$	2%	1,92%	96.5	2%	2%	100
2	07	95		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100
2	07	95	01	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrollogian Balai Kemetrollogian Karawang	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100
2	07	95	02	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrollogian Balai Kemetrollogian Bandung	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100
2	07	95	03	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrollogian Cirebon	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100
2	07	95	04	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrollogian Balai Kemetrollogian Bogor	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100
2	07	95	05	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrollogian Balai Kemetrollogian Tasikmalaya	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100
2	07	95	06	Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Balai Kemetrolgian Tasikmalaya	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100
2	07	95	07	PENGAWASAN BARANG BEREDAR DI PASAR	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100
2	07	95	08	DISEMINASI PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	95	09	RAPAT KOORDINASI PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100
2	07	95	10	Pengawasan Kemetrologian	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100
2	07	95	11	Pengembangan Alat Ukur/Takar (Timbangan) untuk Ukur Ulang di Pasar Tertib Ukur di Kab/Kota	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100
2	07	95	12	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Laboratorium Balai Kemetrologian Bogor	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.822.635 buah	UTTP : 6.089.91 6 buah	UTTP : 6.181.265 buah	UTTP : 4.923.15 1 buah	79	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	100

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.551 buah	BDKT : 1.005 buah	65	BDKT : 1.582 buah	BDKT : 1.582 buah	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Pengembangan bidang industri di Jawa Barat dilakukan melalui 2 (dua) Program yaitu : Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah meliputi 5 (lima) kegiatan dan Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri meliputi 16 (enam belas) kegiatan.

Pengembangan bidang perdagangan dilakukan melalui 3 (tiga) Program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri meliputi 8 (delapan) kegiatan, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan meliputi 6 (enam) kegiatan, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan.

Program dan kegiatan internal organisasi yang terkait dengan biaya/beban tetap terdiri dari 6 (enam) program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 7 (tujuh) kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan serta Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah terdiri 1 (satu) kegiatan.

Evaluasi terhadap masing-masing indikator kinerja kegiatan Bidang Industri dan Perdagangan berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

I. Urusan Wajib

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Pembentukan Wirausahawan Baru, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.180.317.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.890.982.250,- atau 69,16% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya sosialisasi pembentukan wirausahawan baru, penjangkaran peserta , seleksi peserta, bimtek, pelatihan pendampingan, monev dan laporan dan penyusunan cara pembuatan proposal, **Outcome** kegiatan adalah Terbinanya para wirausaha baru

b) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Pendeknya masa perencanaan pelaksanaan kegiatan
2. Tidak adanya Juknis pagu anggaran yang standar khusus untuk tahapan pelaksanaan seperti *psycotest* dan lain-lain
3. Tidak maksimalnya koordinasi antar OPD
4. Opini masyarakat yang menginterpretasikan Wirausaha Baru dengan modal.

Solusi :

1. Perlu dibuatnya perencanaan pelaksanaan yang lebih matang
2. Perlu dibuatnya juknis untuk penganggaran yang standard
Misal : biaya *psycotest* per orang Rp. 100-150 rb dan lain-lain

3. Perlu ditingkatkannya koordinasi dan komunikasi baik antar OPD maupun di internal kegiatan OPD
4. sosialisasi terkait program Wirausaha Baru dengan masalah pemberian modal

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Barat , yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 819.405.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 778.337.300 atau 94,99% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Fasilitasi Kesejahteraan jasmani, Kerohanian/Kesenian, Obat-obatan, Seminar, Lokakarya, Rakor, Bimtekdan Kursus, Diklat Struktural, pengadaan Pakaian Olah Raga, Diklat Fungsional dan Pembinaan Aparatur , **Outcome** Meningkatnya disiplin dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas

3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindag. Prov. Jabar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.005.320.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.803.016.877 atau 93,27% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya administrasi perkantoran dan

Jasa Komunikasi Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat, **Outcome** Tersedianya administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrolgian Bandung, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 537.626.047 atau 89,60% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan Jasa untuk mendukung kelancaran Tugas, Pokok dan Fungsi Kemetrolgian Bandung, **Outcome** Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional Balai Kemetrolgian Bandung
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrolgian Karawang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 778.803.700,- realisasi anggaran sebesar Rp. 549.006.452,- atau 70,49% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan Jasa untuk mendukung kelancaran Tugas, Pokok dan Fungsi Kemetrolgian Karawang, **Outcome** Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional Balai Kemetrolgian Karawang
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrolgian Bogor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 575.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 540.564.061,- atau 94,01% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan Jasa untuk

mendukung kelancaran Tugas, Pokok dan Fungsi Kemetrollogian Bogor, **Outcome** Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional Balai Kemetrollogian Bogor

- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrollogian Cirebon, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.450.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 320.436.551,- atau 91,44% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan Jasa untuk mendukung kelancaran Tugas, Pokok dan Fungsi Kemetrollogian Cirebon, **Outcome** Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional Balai Kemetrollogian Cirebon
- 6) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrollogian Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 525.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 498.746.246,- atau 95,00% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan Jasa untuk mendukung kelancaran Tugas, Pokok dan Fungsi Kemetrollogian Tasikmalaya, **Outcome** Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional Balai Kemetrollogian Tasikmalaya
- 7) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengembangan Perindustrian, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 558.055.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 555.385.925,- atau 99,52% **Output** kegiatan

adalah Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan Jasa untuk mendukung kelancaran Tugas, Pokok dan Fungsi Kemetrolagian Tasikmalaya, **Outcome** Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional Balai Kemetrolagian Tasikmalaya

b) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Balai Kemetrolagian Bogor untuk Anggaran yang tersedia belum mengakomodir keperluan administrasi karena adanya perubahan besaran biaya perjalanan dinas dari sistem at cost ke sistem lumsum

Untuk Solusinya adalah perencanaan untuk kegiatan di tahun 2015 disesuaikan dengan sistem perjalanan dinas yg baru sesuai SBB tahun 2015

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan perdagangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.575.968.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.529.158.330,- atau 98,18% **Output** kegiatan adalah terlaksananya Renovasi Gedung Kantor dan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat, **Outcome** Peningkatan sarana dan prasarana kantor

- 2) Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Balai Kemetrollogian Karawang (Tahap II), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 994.726.423,- atau 99,47% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan Alat standar kemetrollogian, peralatan kantor dan perlengkapan kantor guna mendukung kelancaran Operasional Balai Kemetrollogian Karawang, **Outcome** Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk pelayanan kemetrollogian Karawang
- 3) Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Balai Kemetrollogian Bandung (Tahap II), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 996.478.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 962.806.900,- atau 96,62% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan peralatan standar kemetrollogian dan perlengkapan dan fasilitas kantor guna mendukung kelancaran Operasional Balai Kemetrollogian Bandung, **Outcome** Meningkatnya Pelayanan Kemetrollogian Bandung
- 4) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrollogian Cirebon, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.073.322.625,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.770.799.500,- atau 85,41% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor tahap II guna mendukung kelancaran Operasional Balai Kemetrollogian Cirebon, **Outcome** Meningkatnya Pelayanan Kemetrollogian Cirebon

- 5) Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Perindustrian (Tahap II), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.741.186.000,- atau 97,90% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Renovasi Gedung Kantor Baperin, Sub Unit dan rumah kemasan guna mendukung kelancaran Operasional Balai Pengembangan Perindustrian, **Outcome** Peningkatan sarana dan prasarana kantor
- 6) Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolagian Tasikmalaya (Tahap II), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 937.611.600,- atau 93,76% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Standar Laboratorium Kemetrolagian, Sarana dan perlengkapan fasilitas kantor guna mendukung kelancaran Operasional Balai Kemetrolagian Tasikmalaya, **Outcome** Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Balai Kemetrolagian Tasikmalaya
- 7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Textile Training Centre, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 355.985.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 345.144.000,- atau 96,95% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pembangunan sarana publik Tekstil Training Centre dan pengadaan sarana dan prasarana, **Outcome** Tersedianya sarana dan prasarana Textile Training Centre
- 8) Kegiatan Pembangunan Gedung Sub Unit Pengembangan IKM TPT Majalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.021.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 7.813.521.000,- atau 86,61% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pembangunan gedung Sub Unit Pengembangan IKM Tekstil dan Produk Tekstil, **Outcome** Tersedianya sarana kantor

- 9) Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolagian Bogor (Tahap II), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 785.808.223,- atau 98,23% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan peralatan standar, perkantoran, Standar Uji Kwh Meter ortable, Test Bend Meter Air Rumah Tangga, Standar Uji Bejana Ukur, Komputer Alat Studio, **Outcome** Meningkatnya Pelayanan Kemetrolagian
- 10) Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolagian Cirebon (Tahap II), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 949.238.900,- realisasi anggaran sebesar Rp. 845.248.000,- atau 89,04% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Peralatan Standar dan Alat Uji Laboratorium Kemetrolagian Cirebon, **Outcome** Meningkatnya Pelayanan Kemetrolagian Cirebon
- 11) Kegiatan Pembebasan Tanah untuk Pusat Pelatihan Industri TPT di Majalengka, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.382.205.900,- atau 34,03% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pembebasan Tanah untuk Pusat Pelatihan

Industri TPT di Majalengka, **Outcome** Mencetak Wirausaha Baru

- 12) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Karawang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 979.254.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 975.032.000,- atau 99.57% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Kemetrolgian Karawang, **Outcome** Meningkatnya Pelayanan Kemetrolgian
- 13) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Bogor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 630.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 580.379.000,- atau 92.01% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Kemetrolgian Bogor, **Outcome** Meningkatnya Pelayanan Kemetrolgian
- 14) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Bandung, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 714.836.900,- atau 95.31% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Kemetrolgian Bandung, **Outcome** Meningkatnya Pelayanan Kemetrolgian
- 15) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 146.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 43.725.000,- atau 29.82% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Kemetrolagian Tasikmalaya, **Outcome** Meningkatnya Pelayanan Kemetrolagian

16) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Perindustrian, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 228.584.740,- atau 99.38% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Pengembangan Perindustrian, **Outcome** Peningkatan sarana dan prasarana kantor

b) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah :

- Rencana kontrak dengan Konsultan Pengawas semula 120 hari kalender, sedangkan pelaksanaan konstruksi pembangunan gedung kantor Balai Kemetrolagian Cirebon selama 80 hari kalender maka terdapat perbedaan 40 hari kalender antara pelaksanaan dengan rencana kontrak.
- Untuk Balai Kemetrolagian Tasikmalaya yaitu Lelang Alat-alat Laboratorium diadakan sebanyak 3 kali sehingga untuk pengadaan alat-alat laboratorium sedikit terhambat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut :

- dilakukan addendum kontrak antara PPK dengan Konsultan Pengawas, dengan merubah waktu pelaksanaan semula 120 hari kalender menjadi 80 hari kalender.

➤ Lelang Alat-alat Laboratorium masih dalam proses

5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Dekranasda Prov. Jabar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 739.523.600,- atau 96,60% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor, Halaman Kantor, Fasilitas Kantor, Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor serta Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Dekranasda, **Outcome** kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dekranasda.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolagian Bandung, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 525.098.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 476.061.227,- atau 90,66% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Kebersihan dan Keamanan Kantor, Fasilitas Kantor, Alat-alat Lab dan Peralatan Standar Massa, Timbangan, UAPV dan BDKT di Balai Kemetrolagian Bandung, **Outcome** kegiatan adalah kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana Balai Kemetrolagian Bandung.

- 3) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kemetrolagian Bogor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 576.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 549.407.525,- atau 95,30% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas , Peralatan dan fasilitas kantor, Gedung dan halaman Kantor, serta penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Balai Kemerologian Bogor, **Outcome** kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana Balai Kemetrolagian Bogor.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disperindag Prov. Jabar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.915.620.850,- atau 95,78% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas , Peralatan dan fasilitas kantor, Gedung dan halaman Kantor, serta penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Balai Kemerologian Bogor, **Outcome** kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana Kantor Disperindag Prov. Jabar.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolagian Karawang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.184.987.200,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.056.989.350,- atau 89,20% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Gedung Kantor, Instalasi Listrik, Fasilitas Kantor, Alat-alat Kemetrolagian, Pemeliharaan kebersihan kantor dan

Kemananan kantor Balai Kemetrolagian Karawang, **Outcome** kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor laboratorium Kemetrolagian pada Balai Kemetrolagian Karawang.

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolagian Cirebon, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 459.720.438,- realisasi anggaran sebesar Rp. 418.003.284,- atau 90,93% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan, Gedung Kantor, Rumah Dinas, Fasilitas Kantor, Alat-alat Lab, Alat Standar Lab. Massa dan Timbangan serta UAPV dan Kalibrasi Alat-alat Ukur Balai Kemetrolagian Cirebon., **Outcome** kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana Balai Kemetrolagian Cirebon.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolagian Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 519.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 504.359.920,- atau 97,03% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan, Jasa Kebersihan dan Keamanan, Alat Perlengkapan Kantor, Alat Standar Massa dan Timbangan serta UAPV, Bangunan Gedung Pengujian TUM, dan Gedung Kantor Balai Kemetrolagian Tasikmalaya, **Outcome** kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana Balai Kemetrolagian Tasikmalaya.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Perindustrian dan 9 Sub Unit IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.014.298.200,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.003.654.617,- atau 98,95% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor, Fasilitas Kantor, Mesin/Peralatan, Lingkungan Kantor, Jasa Kebersihan dan Peralatan kebersihan, Pemeliharaan Kendaraan dan Jasa Keamanan (KAMDAL), **Outcome** kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana pada Balai Pengembangan Perindustrian dan (Sembilan) Sub Unit pengembangan IKM.

b) **Permasalahan dan Solusi**

6) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

a) **Pelaksanaan Program**

- 1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan Perdagangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 197.165.000,- atau 98,58% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Penyusunan Renja, Pra RKA, RKA, DPA, dan DPA, LAKIP, LKPJ dan LPPD, Laporan Realisasi Keuangan Dinas dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Rakor Indag Perwilayah, **Outcome** kegiatan adalah terwujudnya koordinasi serta sinergitas program dan kegiatan antara pusat, provinsi dan kab/kota.

7) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Penyusunan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 503.820.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 500.253.600,- atau 99,29% **Output** kegiatan adalah Terlaksananya Pendataan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan, Buku Unggulan Industri dan Perdagangan serta Grand Desain Industri, **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya pelayanan informasi bidang industri dan perdagangan.

II. Urusan Pilihan

1. Urusan Industri

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Pengembangan Industri Kerajinan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 295.796.700,- atau 80.68% **Output** Terlaksananya Fasilitasi Pelatihan Kerajinan Pasir Pantai dan Pelatihan Peningkatan Mutu Tikar Mendong Haj di Tasikmalaya **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah untuk komoditi kerajinan pasir pantai dan pelatihan peningkatan mutu tikar mendong haji.

- 2) Kegiatan Peningkatan Usaha di Lingkungan Rumah Kemasan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 308.338.240,- realisasi anggaran sebesar Rp. 302.477.620,- atau 98.10% **Output** Terlaksananya Pengembangan Layanan Kemasan bagi Pelaku Usaha Makanan Ringan dan Fasilitas Event Pameran **Outcome** kegiatan adalah terfasilitasinya kemasan bagi IKM makanan ringan.
- 3) Kegiatan Fasilitas Kerjasama Industri dan Pengembangan Produk Ekonomi Unggulan di Kab./Kota, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 149.359.700,- atau 99.57% **Output** Terlaksananya Kajian Produk Ekonomi Unggulan, Pusat Logistik berbasis Kewilayahan, Partisipasi pada Forum Kerjasama MPU dan FGD Kajian Produk Ekonomi Unggulan dalam rangka kerjasama Industri **Outcome** kegiatan adalah terfasilitasinya kerjasama IKM Jawa Barat dengan Provinsi lainnya.
- 4) Kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Kewirausahaan Industri Kecil, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 973.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 794.752.000,- atau 81.68% **Output** Terlaksananya Pengembangan Kewirus Olahan Ikan di Pangandaran, Sari Nanas di Kab. Subang, Olahan Talas di Kab. Bogor, Batu Mulis di Kab. Cianjur, Desain Genteng di Kab. Majalengka, Limbah Kertas di Bandung, Pelatihan Perbaikan alat-alat Elektronik di Kab. Majalengka, IK Alsintan di Kab. Sukabumi dan Pakaian Jadi di Kota Bogor **Outcome** kegiatan adalah penumbuhan kewirausahaan industri kecil.

- 5) Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan berbasis Produk Hewani, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 145.250.000,- atau 100% **Output** Terlaksananya Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Pangan berbasis Ternak **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya diversifikasi dan jaminan pengolahan, penerapan manajemen pada industri olahan makanan berbasis produk hewani.

b) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih rendahnya kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh pengusaha IKM kerajinan
2. Masih kurangnya perhatian di bidang kualitas dan desain produk oleh sebagian besar pengusaha.

Solusi :

1. Perlu ditingkatkan tingkatannya pelatihan terkait kreativitas dan inovasi produk, terlebih menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.
2. SDM sebagian pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya peningkatan ketrampilan (aspek produksi) yang lebih berkualitas untuk mendorong peningkatan daya saing, disamping perlunya peningkatan wawasan usaha dan pemasaran (manajemen dan pemasaran)

2) Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif berbasis Teknologi Informasi dan Elektronika, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 271.275.000,- atau 90.43% **Output** Terlaksananya Penguatan Start up Company Techneuprener, Pelatihan Animasi 3 (tia) Dimensi dan Service HP **Outcome** kegiatan adalah terciptanya pertumbuhan industri kreatif berbasis IT dan elektronika.
- 2) Kegiatan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 232.871.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 213.049.000,- atau 91.49% **Output** Terlaksananya CPPOB/GMP bagi IKM Pangan, Pelatihan Diversifikasi Olahan Susu dan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi IKM **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya jaminan pengolahan produksi pangan yang baik dan meningkatnya diversifikasi produk olahan susu.
- 3) Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif berbasis Makanan Olahan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 743.122.493,- realisasi anggaran sebesar Rp. 743.122.493,- atau 100% **Output** Terlaksananya Pelaksanaan Festival Keanekaragaman makanan berbahan baku lokal, Bimtek Pengolahan Pangan dan Partisipasi Pangan Nusa

Outcome kegiatan adalah mendorong tumbuhnya industri andalan masa depan pada industri agro.

- 4) Kegiatan Pengembangan Industri Otomotif, Logam dan Mesin, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 316.938.000,- atau 90.55% **Output** Terlaksananya Pelatihan Teknis Electroplating bagi IKM Komponen Otomotif, Pelatihan Inspeksi Teknik Barang Logam bagi IKM Logam Mesin dan FGD Pengembangan Industri Otomotif **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya keterampilan IKM logam mesin dalam bidang teknis *electroplating* dan Inspeksi teknik barang logam pada industri otomotif.
- 5) Kegiatan Pengembangan Industri Rotan dan Furniture Non Rotan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.100.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 241.100.000,- atau 100% **Output** Terlaksananya kegiatan : Bimbingan Teknis Desain Furniture Kayu, Tersosialisasikannya pengembangan Pusat Desain Rotan, Workshop Pengembangan Industri Rotan Cirebon dan Terrealisasinya Pusat Pengembangan Desain Rotan Cirebon **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya sinergitas pengembangan industri furniture kayu dan rotan serta meningkatnya wawasan pelaku industri terkait, sehingga berdampak pada peningkatan daya saing produk.
- 6) Kegiatan Peningkatan Teknologi Industri Aneka dan Industri Kimia, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 296.450.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 256.100.000,- atau 86.39% **Output** Terlaksananya Fasilitas Pelatihan Pembuatan Sepatu, Pengujian Garam beryodium di tingkat produsen garam beryodium dan Pelatihan Teknologi Garam Krosok dengan sistim intensifikasi (RAMSOL) di Kabupaten Cirebon **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya sinergitas pengembangan industri komoditi IKM alas kaki dan garam rakyat.

- 7) Kegiatan Penguatan Industri Kreatif berbasis Fashion, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 339.397.000,- atau 84.85% **Output** Terlaksananya kegiatan :Peningkatan Teknik Produk Tekstil dan Fasilitas Kegiatan TPT **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kompetensi industri kreatif fashion.
- 8) Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Mutu Industri Kecil Menengah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.299.425.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.281.025.000,- atau 99.44% **Output** Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Halal Produk IKM dan Sosialisasi Fasilitas Sertifikasi Halal Produk IKM **Outcome** kegiatan adalah terfasilitasinya sertifikasi halal produk IKM dan pengetahuan tentang sertifikasi halal bagi IKM.
- 9) Kegiatan Peningkatan Teknologi di Lingkungan Sub Unit Pengembangan IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 381.247.000,- atau 95.31% **Output** Terlaksananya Fasilitas Non PNS di Lingkungan Sub Unit Pengembangan IKM

Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketrampilan SDM di Sub Unit Instalasi.

- 10) Kegiatan Pengembangan Agribisnis dan Industri Olahan berbasis Buah (TKW-31), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 801.024.400,- atau 80.10% **Output** Terlaksananya fasilitasi Kemasan, FGD Pengembangan Industri Olahan Khas Daerah, Bimtek Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Buah, Bimtek GMP, Bimtek Standarisasi dan Bimtek Pengemasan Produk Olahan berbasis Buah **Outcome** kegiatan adalah perbaikan kualitas dan peningkatan kemampuan pelaku usaha.
- 11) Kegiatan Pengembangan Industri Minuman berbasis Kopi, Teh dan Coklat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 340.600.000,- atau 97.31% **Output** Terlaksananya Bimtek Diversifikasi Produk Olahan berbasis Coklat, Kopi dan Teh **Outcome** kegiatan adalah terlaksananya bimtek diversifikasi produk olahan kopi, teh dan coklat.
- 12) Kegiatan Pengembangan Industri Manufaktur berbasis Tematik Kewilayahan (TKW-21), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.421.485.000,- atau 94.77% **Output** Terlaksananya Pelatihan Industri Garment Angkatan 1 dan 2, Pelatihan Pengelasan, Peralatan Elektronika, Peningkatan Desain Kayu di Subang, Fasilitasi Kemasan Produk Olahan

Pangan dan Bimtek Diversifikasi Olahan Pangan **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan keterampilan dan wawasan serta fasilitasi bagi pelaku IKM manufaktur berbasis tematik kewilayahan di Jawa Barat.

- 13) Kegiatan Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah (TKW-22), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 820.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 691.140.000,- atau 84.23% **Output** Terlaksananya FGD Pengembangan IKM Keramik di Kab.Purwakarta (2 Angkatan), Pelatihan Peningkatan Usaha untuk IKM Keraik dan Gerabah (3 Angkatan), Desain Home Decorasi Keramik dan Gerabah(Rumah), \desain Fungsi IKM Keramik dan Gerabah (Spa, Piring dll), Peningkatan Ekspor terrhadap IKM Keramik dan Gerabah (Packaging), Kemitraan/Pemasaran IKM Keramik dan Gerabah, Dukungan Pameran Gerabah dan Keramik dan Grand Desain IKM Keramik dan Gerabah 2014-2018 **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya sinergitas pengembangan IKM industri keramik dan gerabah.
- 14) Kegiatan Kajian Teknis Rancangan Perda Pembinaan Sertifikasi Halal, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 66.400.000,- atau 98.37% **Output** Terciptanya Peraturan Daerah tentang Pembinaan Sertifikat Halal **Outcome** kegiatan adalah mendukung Perlindungan Konsumen dan Jaminan Keamanan Pangan secara religius sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di Jawa Barat

- 15) Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Dukungan Pengembangan IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 467.949.300,- atau 93.59% **Output** Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi dan Dukungan Pengembangan IKM **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya produk IKM Jawa Barat yang tersertifikasi.
- 16) Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Perkembangan Pelaku Industri Citarum Bestari, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 155.445.000,- atau 77.72% **Output** Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan Perkembangan Pelaku Industri disekitar Citarum **Outcome** kegiatan adalah Diperoleh data dan terpetakannya perusahaan yang berpotensi mencemari di hulu Sungai Citarum dan data perusahaan yang sudah mempunyai IPAL dan mempunyai izin industri

b) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

Kegiatan Pengembangan Agribisnis dan Industri Olahan berbasis Buah (TKW-31)

- Terdapat beberapa kendala karena penundaan pelaksanaan di awal tahun sesuai arahan Bappeda Provinsi Jawa Barat sehingga terlambatnya pelaksanaan kegiatan yg tidak sesuai rencana kegiatan

Solusi :

- Dilakukan upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian kegiatan serta percepatan kegiatan

2. Urusan Perdagangan

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 247.820.000,- atau 82.61% **Output** terlaksananya fasilitas pada pameran INACRAFT, pameran dagang dalam rangka P3DN dan fasilitas pengembangan usaha bagi pedagang **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya promosi perdagangan dan penggunaan produk dalam negeri.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 194.413.985,- atau 97.21% **Output** kegiatan adalah terlaksananya bimtek bagi pengelola pasar tradisional, identifikasi, monitoring dan evaluasi revitalisasi pasar tradisional **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya fungsi sarana perdagangan.
- 3) Kegiatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) Dareh, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 117.446.170,- atau 78.30% **Output** kegiatan adalah terlaksananya fasilitas pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Jawa Barat, monitoring pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) dan penyusunan laporan

akhir **Outcome** kegiatan adalah terlaksananya fasilitas pengelolaan gudang sistem resi gudang (SRG) Jawa Barat dan terlaksananya kegiatan rapat evaluasi sistem resi gudang (SRG) tingkat Provinsi Jawa Barat.

- 4) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Perdagangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 143.017.200,- atau 95.34% **Output** kegiatan adalah terlaksananya kerjasama perluasan akses pasar IKM Provinsi Jawa Barat di Kalimantan dan Fasilitasi kemitraan antar pelaku usaha **Outcome** kegiatan adalah terlaksananya kerjasama di bidang perdagangan antar provinsi.
- 5) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 114.421.500,- atau 76.28% **Output** terlaksananya pasar lelang forward komoditi Agro Jawa Barat, FGD pengembangan pasar lelang, identifikasi peserta pasar lelang, inter-koneksitas pasar lelang forward dan penyusunan laporan akhir **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya transaksi/temu bisnis peserta potensial lelang komoditi Agro dengan peserta lelang komoditi Agro Negara lain.
- 6) Kegiatan Dukungan Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 457.464.300,- atau 91.49% **Output** Terlaksananya Sosialisasi Operasi Pasar

Murah (OPM) Kepokmas, dukungan Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas, Supervisi pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas dan Fasilitasi informasi harga Kepokmas **Outcome** kegiatan adalah Terkendalinya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan stabilitas harga bahan pangan.

- 7) Kegiatan Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandan Wangi dan Pengembangan Varietas Unggul (TKW-33), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 272.989.620,- atau 68.25% **Output** Terlaksananya FGD permasalahan distribusi dan pemasaran beras varietas pandanwangi dan varietas unggul, fasilitasi kemasan beras, uji kompetensi kemasan beras, kajian distribusi beras varietas pandanwangi dan penyusunan laporan akhir **Outcome** kegiatan adalah tersosialisasikannya pemuliaan beras varietas pandanwangi dan pengembangan varietas unggul.
- 8) Kegiatan Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias untuk Pasar Regional dan Global (TKW-12), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 492.801.490,- atau 57.98% **Output** Terlaksananya FGD perdagangan pusat budidaya ikan hias, Kajian sistem distribusi ikan hias, FGD kelembagaan perdagangan budidaya ikan hias, FGD Grand Desain pemanfaatan sarana distribusi Ikan Hias, Kajian Grand Desain pemanfaatan sarana distribusi Ikan Hias, Pelatihan manajemen ekspor dan impor ikan hias, Pengembangan perdagangan budidaya ikan hias dan Informasi Pelaku perdagangan Ikan Hias **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya pemasaran ikan hias.

b) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- ❖ Kegiatan Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias untuk Pasar Regional dan Global (TKW-12) :
 - Tidak adanya Grand Desain tentang Pengembangan Ikan Air Tawar dan Ikan Hias di Wilayah I Jawa Barat;
 - Adanya penundaan pencairan dana, dikarenakan belum adanya kesepahaman antara Bappeda dan Biro Keuangan;
 - Pelaksanaan yang efektif dari program Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias untuk Pasar Regional dan Global (TKW-12) mulai triwulan ke 3.
- ❖ Masih sedikitnya gudang yang sudah dibangun Badan Pengawas Berjangka Komoditi yang belum berjalan sesuai peruntukannya (SRG)
- ❖ Masih sedikitnya partisipasi pelaku usaha komoditi agro yang mengikuti pasar lelang dari Kabupaten/Kota
- ❖ Lahan untuk varietas pandanwangi masih sedikit sehingga hasilnya juga belum memadai.
- ❖ Kurang memadainya biaya operasional untuk Kabupaten/Kota penyelenggara Operasi Pasar Murah (OPM) serta terbatasnya titik pelaksanaan OPM

Solusi :

- ❖ Bappeda perlu membuat Grand Desain mengenai pengembangan Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Jawa Barat, yang akan digunakan sebagai acuan dari OPD terkait dalam menyusun kegiatan - kegiatannya sehingga tercipta sinergitas program.

- ❖ Memberikan fasilitasi kepada Kabupaten yang gudangnya belum beroperasi berupa dukungan anggaran pembuatan sertifikasi dan biaya operasional.
- ❖ Melakukan sosialisasi berupa simulasi pelaksanaan pasar lelang di Kabupaten/Kota
- ❖ Perlunya perluasan lahan pertanian untuk beras varietas pandanwangi.
- ❖ Meningkatkan anggaran biaya dukungan Operasi Pasar Murah (OPM) bagi penyelenggara OPM di Kabupaten/Kota

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Peningkatan Promosi Ekspor dan Perluasan Pasar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 241.695.500,- atau 96.68% **Output** Terlaksananya Pelatihan Promosi Lewat Internet dan Partisipasi Pameran di Asia Barat/UEA **Outcome** kegiatan adalah terpromosikannya produk IKM Jawa Barat melalui pameran dan internet.
- 2) Kegiatan Penguatan Daya Saing Produk Ekspor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 764.863.400,- realisasi anggaran sebesar Rp. 744.844.660,- atau 99.73% **Output** Terlaksananya Workshop Identifikasi Potensi Ekspor UKM, Pendampingan (coaching programe), monitoring Ekspor dan Impor dan Trade Expo Indonesia (TEI) **Outcome** kegiatan adalah munculnya UKM yang siap ekspor dan berdaya saing tinggi.

- 3) Kegiatan Pengembangan Jasa Perdagangan dan Industri Kreatif (TKW-44), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 842.667.200,- atau 84.27% **Output** terlaksananya forum kerjasama perdagangan industri kreatif, kajian pengembangan industri kreatif di wilayah priangan, festival fashion dan pameran industri kreatif jawa barat dan partisipasi pameran di jakarta **Outcome** kegiatan adalah mendapatkan data pelaku usaha industri kreatif jawa barat dan meningkatnya peluang pasar produk industri kreatif.

b) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Kegiatan Penguatan Daya Saing Produk Ekspor yaitu untuk Kegiatan workshop tidak melibatkan pelaku usaha yang akan diseleksi karena anggaran tidak mencukupi.

Solusi :

Untuk usulan yang akan datang lebih memprioritaskan anggaran untuk kegiatan seleksi peserta, sehingga aktifitas perusahaan dapat dilihat.

3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolagian Balai Kemetrolagian Karawang, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.117.890.000,- atau 98.51% **Output** terlaksananya pelayanan tera ulang di 5 kab./kota, pelayanan tera/tera ulang, pengujian, kalibrasi, pengendalian, uttp dan bdkt di wilayah Karawang **Outcome** kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kemetrollogian di 5 (lima) wilayah di Karawang meliputi kab. Karawang, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Purwakarta dan Kab. Subang.

- 2) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrollogian Balai Kemetrollogian Bogor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.050.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.045.554.000,- atau 99.78% **Output** Terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 6 Kab./Kota, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di Wilayah Bogor **Outcome** kegiatan adalah terpenuhinya perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran.
- 3) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrollogian Balai Kemetrollogian Bandung, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.624.622.845,- atau 95.57% **Output** Terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 5 Kab./Kota, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di Wilayah Bandung **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya perlindungan konsumen melalui pelayanan Tera/Tera ulang UTTP, pengujian BDKT di wilayah Balai Kemetrollogian Bandung.

- 4) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolagian Balai Kemetrolagian Cirebon, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.110.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.070.200.000,- atau 96.41% **Output** Terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 5 Kab./Kota, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di Wilayah Cirebon **Outcome** kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kemetrolagian di 5 (lima) wilayah Cirebon.
- 5) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolagian Balai Kemetrolagian Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.189.072.500,- atau 99.09% **Output** Terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 5 Kab./Kota, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di Wilayah Tasikmalaya **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya pelayanan UTTP dan Pengujian barang beredar di masyarakat.
- 6) Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Barang Beredar dan Kemetrolagian, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 415.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 342.780.610,- atau 82.60% **Output** Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan Rapat dalam rangka Perlindungan Konsumen **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa dan kemetrolagian.

b) Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Barang Beredar dan Kemetrolagian

- 1) Masih terbatasnya/baru sebagian kecil pengawasan barang/jasa di pasar-pasar tradisional dan toko modern serta di pusat pembelanjaan dan pertokoan
- 2) Dalam menangani Perlindungan Konsumen masih kurang memadai SDM yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terdapat (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen)
- 3) Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini baru 14 (empat belas) Kab/Kota yang sudah mendirikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dari 27 Kab/Kota..
- 4) Masih ditemukan barang beredar dari industri kecil menengah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

❖ Solusi :

- 1) Pemerintah Daerah diharapkan memfasilitasi anggaran yang memadai untuk Kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, sebagai tindakan Preventif untuk mengurangi jatuhnya korban akibat mengkonsumsi produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS PK) dan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPPBJ) dapat ditambah jumlahnya mengingat banyaknya dan semakin beragamnya barang yang beredar baik produk luar negeri maupun produk lokal

- 3) Pemerintah Daerah memberikan perhatian terhadap pentingnya melaksanakan Perlindungan Konsumen dan pengawasan terhadap barang yang beredar baik di pasar tradisional maupun di toko modern
- 4) Untuk menjadikan para pelaku bertanggung jawab atas produk/barang yang dihasilkannya serta menjadikan konsumen yang mandiri, cerdas serta selalu teliti sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk maka kegiatan Perlindungan Konsumen harus terus dilaksanakan

Pada tabel 2.2. dibawah dijelaskan mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan target Renstra.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Nama : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator	Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN		<i>Industri</i>									
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)									
			– Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat	166.52 Triliun Rupiah	175.89 Triliun Rupiah	185.80 Triliun Rupiah	196.26 Triliun Rupiah	207.31 Triliun Rupiah	157.64 Triliun Rupiah	166.52 Triliun Rupiah	175.89 Triliun Rupiah	185.80 Triliun Rupiah

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
			– Peningkatan Jumlah unit usaha IKM	201.955 Unit Usaha	202.455 Unit Usaha	202.95 5 Unit Usaha	203.45 5 Unit Usaha	203.95 5 Unit Usaha	201.45 5 Unit Usaha	201.99 7 Unit Usaha	202.45 5 Unit Usaha	202.95 5 Unit Usaha
			– Peningkatan Nilai Produksi IKM	5%	10%	15%	20%	25%	481.56 Juta Rupiah	712,36 %	10%	15%
			– Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	1500 Org	2500 Org	3000 Org	3500 Org	4000 Org	500 Org	1.445 Org	2500 Org	3000 Org
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri									
		Program Penataan Struktur Industri										
			– Peningkatan Nilai Produksi IKM	5%	10%	15%	20%	25%	481.56 Juta Rupiah	712,36 %	10%	15%
			– Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	1500 Org	2500 Org	3000 Org	3500 Org	4000 Org	500 Org	1.445 Org	2500 Org	3000 Org

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
			– Peningkatan Jumlah wirausaha baru	3000	6000	9000	12000	15000	0	1375	6000	9000
			<i>Perdagangan</i>									
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									
			– Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	2%	2%	3%	3%	4%	25,82 Milyar US\$	1,92%	2%	3%
			– Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun	75	100	125	150	175	1.481 Eksportir	203 Eksportir	100	125
			– Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	2%	2%	2,5%	2,5%	3%	12,23 Milyar US\$	2,78%	2%	2,5%

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri									
			– Jumlah revitalisasi pasar tradisional	15 Unit	20 Unit	25 Unit	30 Unit	35 Unit	12 Unit	19 Unit	20 Unit	25 Unit
			– Jumlah kerjasama perdagangan	5 Buah	5 Buah	5 Buah	5 Buah	5 Buah	5 Buah	1 Buah	5 Buah	5 Buah
			– Terkendalinya inflasi Jawa Barat	Inflasi Jawa Barat < Inflasi Nasional					9,15%	7,14%	Inflasi Jawa Barat < Inflasi Nasional	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan									
			– Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.181.26 5 buah	UTTP : 6.304.89 0 buah	UTTP : 6.430.9 88 buah	UTTP : 6.623.9 17 buah	UTTP : 6.822.6 35 buah	UTTP : 6.089.9 16 buah	UTTP : 4.923.1 51 buah	UTTP : 6.304.8 90 buah	UTTP : 6.430.9 88 buah

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
				BDKT : 1.551 buah	BDKT: 1.582 buah	BDKT : 1.614 buah	BDKT : 1.662 buah	BDKT : 1.712 buah	BDKT : 1.528 buah	BDKT : 1.005 buah	BDKT: 1.582 buah	BDKT : 1.614 buah
2	KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN									
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Kesesuaian struktur jabatan dengan PPNo. 41/2007	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD									
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD	Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
		yang relevan dengan urusan terkait	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD 8 Common Goals									
			Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD									
			Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD									
			Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD									

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Besaran belanja modal	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Besaran belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Besaran belanja pemeliharaan	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Laporan keuangan SKPD	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penggunaan bidang tanah oleh SKPD	Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan PAD Bidang Industri dan Perdagangan	14.500.000.000	14.963.000.000	-	-	-	20.288.431.800	16.168.700.900	14.963.000.000	-

Berikut ini adalah pencapaian kinerja bidang Industri dan Perdagangan pada Tahun 2013 – 2014 secara umum yang terdiri dari :

No.	Uraian	2013	2014
1.	Perolehan Penghargaan Upakarti dalam upaya : <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan IKM (jasa pengabdian, kepeloporan, kependulian dan IKM modern) • Perolehan Design terbaik/IDGS (produk : alat musik, kerajinan, fashion dan asesories, furniture) • UKM Pangan Award (Diversifikasi produk, kreasi kemasan menarik dan inovasi produk dan bahan baku) • Penghargaan Kreasi Prima Mutu • Penghargaan Rintisan Teknologi 	2 Perusahaan - - - - -	- - - - -
2.	Perolehan Penghargaan Primaniyarta dalam Upaya Program Pengembangan & Peningkatan Ekspor Jabar	6 Perusahaan	2 Perusahaan
3.	Tingkat Perkembangan laju Inflasi dalam Upaya Pengendalian/stabilitas harga	3,86% (yoy)	7,18% (yoy)
4.	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	405 orang	370 orang
5.	Tingkat Kehadiran rata-rata pegawai	90%	90%
6.	Jumlah pelaku ekspor yang difasilitasi promosi dagang di luar negeri	18 Perusahaan	2 perusahaan
7.	Jumlah Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk ekspor /Certificate of Origin	43.249 dokumen	47.570 dokumen
8.	Jumlah pelayanan penerbitan Angka Pengenal Importir (API)	1.251 dokumen	629 dokumen

9.	Jumlah penerimaan retribusi bidang Industri dan Peragangan	Rp. 20.288.431.800	Rp. 16.168.700.900
10.	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	6.089.916 unit	4.923.151 unit
11.	Jumlah BDKT yang dilakukan pengujian	1.528 unit	1.005 unit
12.	Jumlah Unit Usaha	201.455 unit usaha	201.997 unit usaha
13.	Jumlah penerbitan SIUP dan TDP	158.218 unit	176.603 unit
14.	Frekwensi pengawasan barang beredar	6 kali	15 kali
15.	Jumlah sarana perdagangan yang berfungsi di kab./kota	681 pasar tradisional 2.920 toko modern	681 pasar tradisional 2.963 toko modern
16.	Jumlah nilai ekspor Jawa Barat	25,82 Milyar US\$	26,32 Milyar US\$
17.	Volume nilai ekspor Jawa Barat	7,05 juta ton	6,54 juta ton
18.	Nilai Transaksi lelang forward	Rp. 239,577 Milyar	Rp. 91,273 Milyar
19	Pelayanan rekomendari Izin Usaha Industri dengan investasi diatas Rp. 10 Milyar	0 perusahaan (baru & perluasan)	0 perusahaan (baru & perluasan)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas pokok dan Fungsi Dinas.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tentunya memperhatikan kondisi kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan arah dan kebijakan Pemerintah Pusat (hasil Rakor Kementerian Perindustrian yang berhubungan dengan kebijakan sektor Industri dan Perdagangan serta sinergitas antar sektor dan antar Kab./Kota di Jawa Barat. Kebijakan tersebut merupakan dasar dan langkah untuk menyusun prioritas program/kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen kebijakan, tentunya disesuaikan dengan isu strategis dan dinamika perubahan yang terjadi dilapangan.

Di urusan Industri, arah pengembangan industri sesuai Kebijakan industri nasional meliputi Visi Pembangunan Industri Nasional pada tahun 2035 adalah Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, dimana disusun dalam upaya melaksanakan pembangunan industri ke depan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

1. masih lemahnya daya saing industri nasional;
2. belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;
3. masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa; dan

4. belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ini memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No. 3 tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan Perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN memiliki masa berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dan bila diperlukan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 digit pada tahun 2035 sehingga *share* industri terhadap PDB mencapai 30 persen.
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, penolong dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri.
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia.
4. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.
6. Kuatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan antara yang berbasis sumber daya alam.

Sasaran pembangunan sektor industri yang akan dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 s.d. 2035 (persen)

NO	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2014	2015	2020	2025	2035
1.	Pertumbuhan sektor Industri Non Migas	%	6,18	6,83	8,51	9,11	10,46
	a. Makanan, Minuman dan Tembakau		5,35	5,64	6,99	7,26	7,68
	b. Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki		5,60	5,86	7,10	7,37	8,20
	c. Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.		6,06	6,12	6,04	6,45	6,81
	d. Kertas dan Barang cetakan		3,69	4,07	4,67	5,65	6,33
	e. Pupuk, Kimia & Barang dari karet		2,07	3,23	7,98	8,29	10,22
	f. Semen & Brg. Galian bukan logam		3,19	4,66	6,83	8,30	9,55
	g. Logam Dasar Besi & Baja		5,69	6,78	5,60	6,82	7,15
	h. Alat Angk., Mesin & Peralatannya		9,07	9,80	10,73	11,16	12,24
	i. Barang lainnya		3,24	2,69	3,12	4,05	5,44
2.	Share Industri non migas terhadap PDB	%	21,06	21,22	24,88	27,44	30,00
3.	Share ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	62,86	66,26	69,85	73,46	78,39
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Juta orang	14,88	15,44	18,44	21,73	29,19
5.	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri non migas	%	43,52	43,08	26,98	23,00	20,00
6.	Nilai Investasi sektor industri	Rp Trilyun	210	270	510	1.000	1.930
	Investasi di P Jawa terhadap total investasi sektor industri	%	72	69	62	55	40
	Investasi di luar P Jawa terhadap total investasi sektor industri	%	28	31	38	45	60
7.	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	29,00	30,00	32,00	35,00	40,00

Di urusan Perdagangan, Rencana Strategi Pembangunan Perdagangan 2015-2019 memiliki Tujuan untuk :

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;

5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Rencana Strategis Pembangunan Perdagangan 2015-2019 memiliki sasaran untuk :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional;
3. Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor;
4. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif);
5. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding);
6. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor;
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor;
8. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan;
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional;
10. Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga

nasional;

11. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG, dan pasar lelang;
12. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah;
13. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
14. Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan;
15. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa;
16. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha di bidang perdagangan dalam negeri dan bidang perdagangan luar negeri;
17. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
18. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan;
19. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih;
20. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal;
21. Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan;
22. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian.

Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2015 ini diproyeksikan akan mencapai 5,8% sedangkan untuk tahun 2016 diproyeksikan 6,0%-6,4%. Pengangguran untuk tahun 2015 diproyeksikan sekitar 5,5%-5,8% dan untuk tahun 2016 diproyeksikan 5,4%-5,6%. Angka kemiskinan untuk tahun 2015 diproyeksikan 9,0%-10% dan untuk tahun 2016 diproyeksikan 8,5%-9,5%. Selanjutnya arah kebijakan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menjadi acuan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah dalam pelaksanaan program dan Kegiatan prioritas dalam tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Jawa

Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Tahun 2016 merupakan tahun ke 3 (tiga) masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja, saat ini tengah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Berkaitan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tengah merumuskan Visi Tahun 2013-2018 untuk seterusnya akan dijabarkan dalam misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Disamping rujukan diatas, lingkup tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi, beberapa Isu-isu strategis Jawa Barat serta Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan konsistensi perencanaan serta program sebelumnya juga merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas antara lain :

Kendala Internal

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penerima dan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menurun.
2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.
3. Penggunaan sarana dan prasarana masih belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif termasuk mengaktifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan seperti Instalasi di Balai Pengembangan Perindustrian (Baperin).

4. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat.
5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan.
6. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan Tematik Kewilayahan.

Permasalahan eksternal :

1. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota;
2. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memiliki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;
3. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;
4. Frekuensi, luas jangkauan dan ketersediaan sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen.

Upaya-upaya pemecahan masalah adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyiapan tenaga fungsional baik Penera maupun

Penyuluh;

2. Melakukan koordinasi dengan OPD bidang Ekonomi lainnya dalam rangka sinergitas program dan kegiatan;
3. Mendorong peran serta Kabupaten/Kota untuk menumbuhkan industri kreatif sesuai dengan potensi daerahnya dan melakukan kegiatan pembinaan/konsolidasi dalam upaya perkuatan industri kreatif berbasis komunitas dan membangun jejaring bisnis antar daerah/wilayah;
4. Mendorong standarisasi dan sertifikasi pada produk industri unggulan/masa depan diantaranya GMP, HACCP dsb;
5. Kecenderungan perluasan akses pasar baru bagi eksportir mencari pasar baru antara lain China dan Timur Tengah dan peningkatan impor bahan baku dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan potensial menyerap tenaga kerja diantaranya melalui peningkatan daya saing produk.
6. Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian sehingga kebutuhan alat ukur kemetrologian mulai tersedia walaupun secara bertahap.
7. Peningkatan koordinasi untuk program dan kegiatan yang sinergis sehingga lebih efisien dan efektif.
8. Meningkatkan misi dagang terstruktur multi sektoral didasari dengan Updating Pemetaan komoditas dan jasa unggulan beserta diversifikasinya dengan meningkatkan nilai tambah relative tinggi (via industrialisasi) dan mekanisme Standardisasi komoditas dan profesi bertaraf Internasional.

Keberadaan Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu OPD di Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat mewujudkan sosok Provinsi Jawa Barat dibidang industri pada tahun 2016 kearah berkembangnya produk-produk industri baik dalam konteks substitusi impor maupun orientasi ekspor secara mandiri maupun aliansi/kolaborasi sebagai hasil pengembangan klaster industri yang semakin kompetitif. Dalam pengembangan industri kreatif mengacu kepada Rencana Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif 2009-2015 diantaranya fesyen dan kerajinan, sehingga akhirnya dapat membuat rencana kerja berupa

program dan kegiatan nyata (rencana aksi) yang akan dilakukan untuk mengembangkan sektor industri kreatif tersebut. Untuk bidang perdagangan diharapkan berkembangnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri baik yang bersumber dari produk dengan lokal content tinggi maupun terdapat kandungan impor dalam keseimbangan transaksi antar daerah dan antar negara yang mampu memberikan surplus kepada pendapatan regional Jawa Barat.

Untuk kegiatan-kegiatan yang alokasi anggarannya bersumber dari APBN/Dekon, pada prinsipnya disinergikan guna mendukung sasaran akhir yaitu pertumbuhan industri dan perdagangan Jawa Barat yang selanjutnya berdampak kepada peningkatan daya beli, pengurangan jumlah pengangguran dan penurunan jumlah penduduk miskin.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tabel dibawah terdapat review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perindag. Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang mengimplementasikan perencanaan penganggaran tahunan.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

Nama : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib					Urusan Wajib					
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jawa Barat	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	9.000 WUB	6.000.000	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jawa Barat	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	9.000 WUB	9.000.000	
1	Pembentukan Wirausaha Baru		Peningkatan Jumlah wirausaha baru	9.000	6.000.000	Pembentukan Wirausaha Baru		Peningkatan Jumlah wirausaha baru	9.000	9.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jawa Barat	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	397.800	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jawa Barat	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	397.800	
1 s.d 2	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Industri dan Perdagangan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 	Jawa Barat	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	397.800	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Industri dan Perdagangan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 	Jawa Barat	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	397.800	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jawa Barat	Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis	25 Orang	850.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jawa Barat	Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis	25 Orang	850.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Dinas Perindag Prov. Jabar	Bandung	Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis	25 Orang	1.000.000	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perindag Prov. Jawa Barat	Bandung	Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis	25 Orang	1.000.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jawa Barat	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD	100	8.712.510	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jawa Barat	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD	100	8.712.510	
01 s/d 07	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindag Prov. Jabar, Balai Kemetrolagian (Bandung, Karawang, Bogor, Ciebon, Tasikmalaya), Balai Pengembangan Perindustrian, Gd. Dekranasda Jabar.	Jawa Barat	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD	100	8.712.510	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindag Prov. Jabar, Balai Kemetrolagian (Bandung, Karawang, Bogor), Balai Pengembangan Perindustrian	Jawa Barat	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD	100	8.712.510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jawa Bara	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	17.115.187,5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jawa Barat	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	17.115.187,5	
01 s/d 09	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perindag Prov. Jabar,, Balai Kemetrolagian (Bandung, Karawang, Bogor, Ciebon), Balai Pengembangan Perindustrian, Pembangunan Sub Unit Tekstil Majalaya.	Bandung	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	17.115.187,5	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Perindag Prov. Jabar dan UPTD	Bandung	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	17.115.187,5	
1	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jawa Barat	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	11.989.370,5	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jawa Barat	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	11.989.370,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 s/d 08	Kegiatan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kantor Dinas, Balai Kemetrolagian (Bandung, Karawang, Bogor, Ciebon, Tasikmalaya), Balai Pengembangan Perindustrian, Gd. Dekranasda Jabar	Jawa Barat	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	11.989.370,5	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perindag Prov. Jabar, Balai Kemetrolagian (Bandung, Karawang, Bogor), Balai Pengembangan Perindustrian	Jawa Barat	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	11.989.370,5	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	433.200	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	433.200	
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan Perdagangan	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	433.200	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan Perdagangan	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	433.200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	819,000	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	819,000	
1	Kegiatan Penyusunan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	819,000	Kegiatan Penyusunan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	819,000	
2	Urusan Pilihan					Urusan Pilihan					
2	<i>Industri</i>					<i>Industri</i>					
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jawa Barat	1. Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat	185.80 Triliun Rupiah	16.819.330	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jawa Barat	1. Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat	185.80 Triliun Rupiah	16.819.330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Peningkatan Jumlah unit usaha IKM	3%				2. Peningkatan Jumlah unit usaha IKM	3%		
			3. Peningkatan Nilai Produksi IKM	15%				3. Peningkatan Nilai Produksi IKM	15%		
			4. Peningkatan Jumlah wirausaha baru	9.000				4. Peningkatan Jumlah wirausaha baru	9.000		
2	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jawa Barat	1. Peningkatan Nilai Produksi IKM	15%	7.470.000	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jawa Barat	1. Peningkatan Nilai Produksi IKM	15%	7.470.000	
			2. Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	3.000				2. Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	3.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<i>Perdagangan</i>					<i>Perdagangan</i>					
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	Jawa Barat	1. Jumlah revitalisasi pasar tradisional 2. Jumlah kerjasama perdagangan 3. Terkendalnya inflasi Jawa Barat	25 Unit 5 Buah Inflasi Jawa Barat < Inflasi Nasional	9.700.000	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	Jawa Barat	1. Jumlah revitalisasi pasar tradisional 2. Jumlah kerjasama perdagangan 3. Terkendalnya inflasi Jawa Barat	25 Unit 5 Buah Inflasi Jawa Barat < Inflasi Nasional	9.700.000	
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jawa Barat	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	3%	3.500.000	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jawa Barat	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	3%	3.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	125 Ekspor- tir				Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	125 Eksportir		
			Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	2,5%				Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	2,5%		
3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jawa Barat	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.430.9 88 buah BDKT : 1.614 buah	11.203.602	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jawa Barat	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.430.988 buah BDKT : 1.614 buah	11.203.602	

Tabel 2.5

RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA BARAT

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Urusan Wajib						
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jawa Barat	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	9.000 WUB	9.000.000	APBD Provinsi	
1	Pembentukan Wirausaha Baru		Peningkatan Jumlah wirausaha baru	9.000	6.000.000		
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jawa Barat	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	397.800	APBD Provinsi	
1 s.d 2	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Industri dan Perdagangan 	Jawa Barat	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	397.800		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<ul style="list-style-type: none"> Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jawa Barat	Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis	25 Orang	850.000	APBD Provinsi	
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perindag Prov. Jawa Barat	Bandung	Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis	25 Orang	1.000.000		
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jawa Barat	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD	100	8.712.510	APBD Provinsi	
01 s/d 07	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindag Prov. Jabar, Balai Kemetrolagian (Bandung, Karawang, Bogor), Balai Pengembangan Perindustrian	Jawa Barat	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD	100	8.712.510		
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jawa Barat	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	17.115.187,5	APBD Provinsi	
01 s/d 09	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Perindag Prov. Jabar dan UPTD	Bandung	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	17.115.187,5		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jawa Barat	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	11.989.370,5	APBD Provinsi	
01 s/d 08	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perindag Prov. Jabar, Balai Kemetrolgian (Bandung, Karawang, Bogor), Balai Pengembangan Perindustrian	Jawa Barat	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal	75	11.989.370,5		
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	433.200	APBD Provinsi	
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan Perdagangan	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	433.200		
8	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	819,000	APBD Provinsi	
1	Kegiatan Penyusunan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan	Bandung	Tingkat keterlambatan pelaporan	2%	819,000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Urusan Pilihan						
2	Industri						
9	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jawa Barat	1. Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat	185.80 Triliun Rupiah	16.819.330	APBD Provinsi	
			2. Peningkatan Jumlah unit usaha IKM	3%			
			3. Peningkatan Nilai Produksi IKM	15%			
			4. Peningkatan Jumlah wirausaha baru	9.000			
10	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jawa Barat	Peningkatan Nilai Produksi IKM	15%	7.470.000	APBD Provinsi	
			Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	3.000			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	<i>Perdagangan</i>						
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	Jawa Barat	3. Jumlah revitalisasi pasar tradisional	25 Unit	9.700.000	APBD Provinsi	
			4. Jumlah kerjasama perdagangan	5 Buah			
			4. Terkendalinya inflasi Jawa Barat	Inflasi Jawa Barat < Inflasi Nasional			
12	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jawa Barat	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	3%	3.500.000	APBD Provinsi	
			Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	125 Eksportir			
			Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	2,5%			
13	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jawa Barat	Jumlah UTTP dan BDKT	UTTP : 6.430.988 buah	11.203.602	APBD Provinsi	
				BDKT : 1.614 buah			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan tidak lepas dari peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan baik di strata Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten /Kota, selain itu dari juga dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, LSM, maupun Asosiasi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Daftar usulan Program dan Kegiatan Masyarakat serta hasil Forum OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terdapat pada lampiran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Industri Nasional dalam panjang mengacu pada RPJPN 2005-2025 (Undang-undang NO.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang **Kebijakan Industri Nasional**. Sedangkan untuk jangka menengah sesuai dengan RPJMN 2015-2019 (Perpres Nomor 2 Tahun 2015). Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh;
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan;
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (2015-2035) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No. 3 tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan Perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Sasaran utama pembangunan sektor industri tahun 2015 antara lain: pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 6,1-6,8%, jumlah tenaga kerja sektor industri sebanyak 15,5 juta orang, kontribusi ekspor sektor industri mencapai 67,3%, serta nilai investasi sektor industri sebesar Rp 270 Triliun.

Dalam mencapai sasaran pembangunan industri tahun 2015 tersebut, berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain: a) Masih lemahnya daya saing industri nasional; (b) Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional; c) Belum optimalnya alokasi sumber daya energi dan bahan baku serta pembiayaan industri; d) Masih banyaknya ekspor komoditi primer (gas, batu bara, mineral logam, minyak sawit, kakao, karet, kulit); serta e) Belum memadainya dukungan sarana prasarana industri seperti kawasan industri, jaringan energi, telekomunikasi, transportasi dan distribusi.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mencapai sasaran pembangunan industri telah ditetapkan arah kebijakan umum pembangunan industri yang difokuskan pada: a) Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau Jawa; b) Penumbuhan Populasi Industri, dengan menambah paling tidak sekitar 9.000 usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20.000 unit usaha, serta c) Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja).

Untuk mendukung Visi Misi Presiden RI sebagaimana dinyatakan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita, telah ditetapkan 10 Program Quick Wins Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019 yaitu, yaitu:

- a) Pembangunan 14 Kawasan Industri di luar Pulau Jawa kerja sama Pemerintah dan Swasta;
- b) *Re-disain Road Map* Industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan Nawa Cita;
- c) Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri;
- d) Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agro industri;
- e) Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk-produk industri;
- f) Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri;
- g) Peningkatan pendidikan dan skill terutama berkaitan dengan operasionalisasi barang modal dan mesin-mesin;

- h) Fasilitas terhadap industri dalam negeri dari dampak perjanjian-perjanjian internasional;
- i) Penurunan Rezim Impor;
- j) Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar), industri *intermediate* dan industri hilir (*light*)

Guna melaksanakan program pembangunan industri, masing-masing sektor melakukan program-program aksi sebagai berikut:

- a. Pengembangan basis industri manufaktur memfokuskan pada hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan produk industri berorientasi ekspor serta pengembangan industri substitusi impor bahan baku & barang modal. Upaya pengembangan industri tersebut salah satunya dilakukan melalui pemberian insentif guna menarik investasi.
- b. Pengembangan industri agro difokuskan antara lain pada: 1) Peningkatan kemampuan teknologi industri kayu dan rotan; 2) Peningkatan kompetensi SDM industri pengolahan kayu dan rotan bidang desain; 3) Fasilitas mentoring, pendampingan dan bantuan pembiayaan sertifikasi SVLK dan V-Legal pada perusahaan furniture dan kerajinan kayu; 4) Peningkatan kemampuan teknologi industri hilir kopi; 5) Peningkatan kemampuan teknologi industri pengolahan susu; 6) Peningkatan kemampuan teknologi industri es balok; 7) Pengembangan Teknologi Pengolahan Rumput Laut; 8) Pengembangan Teknologi Industri Pengolahan Kakao.
- c. Pengembangan industri unggulan berbasis teknologi tinggi, difokuskan pada: 1) pengendalian impor kapal bukan baru dengan membatasi umur kapal muda; 2) Penghapusan pengenaan PPN penyerahan kapal untuk galangan kapal nasional; 3) pemberdayaan NaSDEC sebagai pusat desain dan rekayasa kapal nasional; 4) Sertifikasi industri komponen pesawat terbang (N219); 5) Peningkatan kemampuan industri komponen kapal; 6) Pengendalian Penjualan handphone melalui standardisasi dan kebijakan perpajakan; 7)

Pengenaan PPN dan PPh terhadap pembelian bahan baku dan komponen kepada produsen/pemanufaktur produk mesin/peralatan energi di dalam negeri; serta 8) peningkatan kualitas mesin/peralatan produksi perusahaan BUMN.

- d. Pengembangan IKM difokuskan pada: 1) Fasilitas Pengembangan Produk IKM; 2) Fasilitas Peningkatan Kemampuan Sentra; 3) Fasilitas Pembangunan Wirausaha Industri; 4) Fasilitas Peningkatan Kemampuan UPT; serta 5) Fasilitas Bantuan Informasi Pasar, Pendampingan, Promosi dan Pameran IKM.
- e. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan industri melalui Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau Jawa, Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi pembangunan 14 kawasan industri diluar pulau Jawa dan 22 SIKIM. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan: Ketersediaan Lahan; Daya dukung lingkungan; Isu perburuhan; Relokasi industri; Penyediaan Infrastruktur; Pengaturan Tata Ruang; serta Penyediaan SDM yang berkualitas.
- f. Dalam rangka kerja sama internasional difokuskan pada akses dan pengembangan pasar internasional: membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri; meningkatkan integrasi industri dalam negeri kedalam jaringan rantai suplai global, dan; meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri. Perlu dilakukan langkah dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, antara lain: mengintensifkan sosialisasi AEC 2015 kepada *stakeholder* industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan *safeguard* dan *anti-dumping* bagi produk impor tertentu, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri, Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada masing-masing sektor industri, serta penguatan IKM dan pengembangan wirausaha baru industri.

- g. Disamping itu dibutuhkan unit pendukung yang akan difokuskan pada upaya-upaya peningkatan daya saing industri melalui Pengembangan Standarisasi Industri; Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi; Pengembangan Industri Hijau serta Penyediaan Dukungan Insentif.
- h. Agar program-program tersebut dapat tercapai sesuai rencana maka dilakukan pengendalian pada penguatan, penerapan sistem pengendalian internal pada setiap kegiatan yang memiliki potensi resiko tinggi dengan melakukan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Penyelenggaraan pengawasan mengutamakan pengawasan preventif dan preemtif dengan fokus pembinaan, advokasi, pendampingan dan pengendalian pada setiap tahapan kegiatan melalui efektivitas proses tata kelola yang baik dan manajemen risiko.
- i. Disamping itu dilakukan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Perindustrian dengan syarat pengusulannya yaitu: sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, dapat mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi. Pembangunan zona integritas dapat dicapai melalui 8 rencana aksi.

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun kedepan akan disesuaikan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 3 atau dalam periode 2015-2019 memiliki arah kebijakan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta mampu IPTEK yang terus meningkat. Berdasarkan arahan

tersebut pembangunan Indonesia dalam periode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu agenda pembangunan Sektor ekonomi adalah modernisasi sektor jasa dengan tujuan meningkatkan daya saing yang antara lain dilakukan melalui peningkatan ekspor non migas dan jasa bernilai tambah tinggi, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah :

1. Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 10,5 persen per tahun;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan (RPJMN 2015-2019) adalah **"meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa"** melalui :

- a. Peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional; serta
- b. Pengoptimalan upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri (RPJMN 2015-2019) adalah **"meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan"** melalui :

- a. Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; serta
- c. Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu :

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama
2. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub perdagangan internasional
3. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
4. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional
5. Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
6. Meningkatkan perlindungan konsumen
7. Meningkatkan efisiensi sistem distribusi & logistik
8. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan

Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan, Misi yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan atlat kelola pemerintah yang baik di sektor perdagangan.

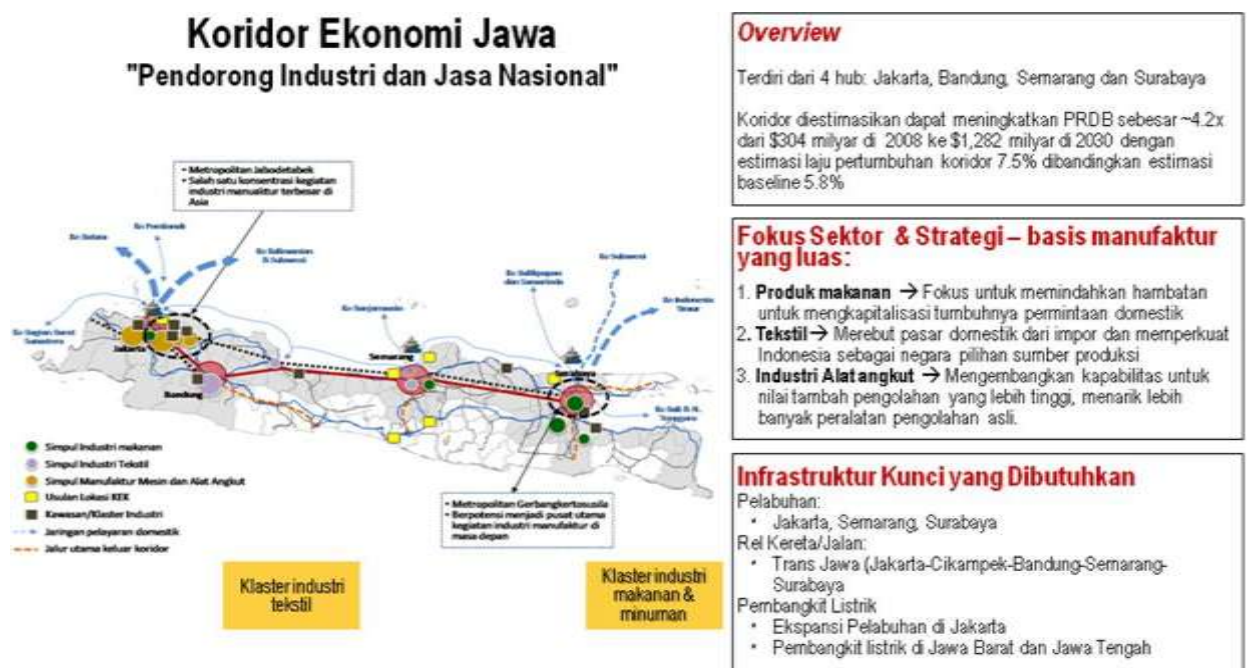
Berdasarkan misi tersebut telah dirumuskan sasaran strategis untuk jangka waktu 2015-2019 adalah :

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015-2019

MISI	1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan		2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas			3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan	
TUJUAN	1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah Dan Jasa	3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional	6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri	8. Optimalisasi/ Penguatan pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang	10. Peningkatan Perlindungan Konsumen	12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi	13. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan
	2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan	4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding	7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN)	9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	11. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha	14. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian	
SASARAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa (1)	Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (Nation Branding) (4)	Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan (6)	Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang (8)	Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan Perbatasan (5,7,9,10)	Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik (12)	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal (12)
	Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional (2)	Optimalnya Kinerja Kelembagaan Ekspor (3, 4)	Meningkatnya Konektivitas Distribusi dan Logistik Nasional (6)	Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah (9)	Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa (10)	Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme SDM Sektor Perdagangan (12)	Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi (13)
	Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor (3)	Meningkatnya Pengelolaan LN di Perbatasan	Meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga Nasional terhadap Produk Dalam Negeri dan/atau Menurunnya Impor Barang Konsumsi (7)	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (9)	Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha (11)	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih (12)	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian (14)
	Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif) (2,3)	Meningkatnya Pelayanan & Kemudahan Berusaha Bidang Daglu					

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, eksklusif dan berkelanjutan dicapai untuk mencapai target sasaran 6 (enam) koridor prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan di setiap pulau dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi atau sektor). Koridor Jawa akan dijadikan pendorong industri dan jasa nasional. Industri yang akan dikembangkan antara lain :

- Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Majalengka dan Semarang
- Industri Otomotif dan Permesinan di Jakarta- Cikampek
- Industri Makanan & Minuman di Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim
- Industri Elektronika dan Telematika di Jakarta, Bandung, Solo, Kudus, Salatiga dan Surabaya.
- Industri Perkapalan di Lamongan Jatim
- Industri Petrokimia di Tuban jatim
- Industri Baja di Banteng
- Industri Semen di Banten, Jateng dan Jatim



Disamping penetapan 6 koridor, pertumbuhan tinggi yang inklusif dapat dicapai dengan pengintegrasian ekonomi melalui pembangunan” konektivitas” nasional yang diharapkan akan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut sehingga memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui keterpaduan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disperindag Jabar

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disperindag Jabar Tahun 2016 adalah :

Tujuan	Sasaran
Berkembangnya industri Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar 2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produk 3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri
Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor	Meningkatnya prosuk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan 2. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk

3.3. Program dan Kegiatan

Berikut ini adalah program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah :

1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
3. Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
4. Peningkatan dan Pengembangan sistem perdagangan dalam negeri
5. Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
6. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Jika dihubungkan dengan sasaran strategisnya, tampak sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Program Utama
1	2
Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1	2
	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Rincian kegiatan yang akan dilakukan tahun 2016 baik sumber dana APBN maupun APBD, secara umum **harus mampu membidik sasaran strategis** yang telah ditetapkan. Dihubungkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2015 dan telaahan terhadap arah kebijakan pengembangan sektor industri dan sektor perdagangan, maka yang harus dikerjakan oleh sektor industri dan perdagangan **di Wilayah Provinsi Jawa Barat** adalah :

- 1) Memfasilitasi peningkatan kualitas produk unggulan dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki).

- 2) Memfasilitasi peningkatan unit usaha industri kecil menengah dan kemitraan antar industri.
- 3) Mendorong dan memfasilitasi perdagangan luar negeri, promosi dagang dan pengembangan pasar luar negeri.
- 4) Mewujudkan pasar tradisional yang sehat dan bersih melalui revitalisasi pasar
- 5) Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien
- 6) Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan
- 7) Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen
- 8) Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur/takar/ timbang dan perlengkapannya
- 9) Pembangunan Pusat-Pusat Perdagangan kluster Komoditi Unggulan dan Pusat Logistik berbasis Kewilayahan

Program/Kegiatan usulan APBD Dinas Perindag. Prov. Jabar Tahun Anggaran 2016, yaitu :

Program dan Kegiatan **Urusan Wajib** pada Tahun 2016 pada dasarnya relatif sama karena merupakan dukungan terhadap layanan internal organisasi, terdiri dari 6 Program dengan Kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Urusan Pilihan

Terdiri dari 5 (lima) Program, Kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3. Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Daftar rincian usulan kegiatan tahun 2016 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Provinsi Jawa Barat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Koding				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Wajib								
1	6			Perencanaan Pembangunan								
1	6	29		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
			01	Rapat Koordinasi Industri dan Perdagangan	Jumlah pelaksanaan dalam satu tahun	Jawa Barat	27 Kab./ Kota	187,200	APBD Provinsi		27 Kab./Kota	187,200
			02	Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah Dinas Kab./Kota yang terlibat	Bandung	4 kali	210,600	APBD Provinsi		4 kali	210,600
1	10			Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah								

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	35		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;								
			01	Pembentukan Wirausahawan Baru	Jumlah Wirausaha baru yang dilatih	Jawa Barat	9.000	9,000,000	APBD Provinsi		12.000	9,000,000
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	59		Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;								
			01	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Disperindag Prov Jabar	Keikutsertaan dalam pelatihan	Jawa Barat	100%	1,000,000	APBD Provinsi		100%	1,000,000
1	20	60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
			01	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrolgian Tasikmalaya	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	Tasikmlaya	12 Bulan	750,000	APBD Provinsi		12 Bulan	750,000
			02	Administrasi Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	Bandung	12 Bulan	2,500,000	APBD Provinsi		12 Bulan	2,500,000
			03	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrolgian Cirebon	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	Cirebon	12 Bulan	750,000	APBD Provinsi		12 Bulan	750,000
			04	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrolgian Bogor	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	Bogor	12 Bulan	1,060,000	APBD Provinsi		12 Bulan	1,060,000
			05	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrolgian Karawang	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	Karawang	12 Bulan	1,000,000	APBD Provinsi		12 Bulan	1,000,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			06	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrolgian Bandung	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	Bandung	12 Bulan	652,510	APBD Provinsi		12 Bulan	652,510
			07	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengembangan Perindustrian	Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD	Bandung	12 Bulan	2,000,000	APBD Provinsi		12 Bulan	2,000,000
1	20	61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;								
			01	Lanjutan Pembangunan Workshop Sub Unit PIKM Kerajinan Tasikmalaya	Jumlah sarana dan prasarana	Tasikmalaya	75%	300,000	APBD Provinsi		75%	300,000
			02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Cirebon	Jumlah sarana dan prasarana	Cirebon	75%	952,369	APBD Provinsi		75%	952,369
			03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	Jumlah sarana dan prasarana	Bandung	75%	1,500,000	APBD Provinsi		75%	1,500,000
			04	Fasilitasi untuk Mendukung Pembangunan Gedung Pelatihan Garmen	Jumlah sarana dan prasarana	Majalengka	75%	5,000,000	APBD Provinsi		75%	5,000,000
			05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Bogor	Jumlah sarana dan prasarana	Bogor	75%	1,728,150	APBD Provinsi		75%	1,728,150
			06	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Karawang	Jumlah sarana dan prasarana	Karawang	75%	3,500,000	APBD Provinsi		75%	3,500,000
			07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Perindustrian	Jumlah sarana dan prasarana	Bandung	75%	2,000,000	APBD Provinsi		75%	2,000,000
			08	Renovasi dan Perluasan Work Shop Sub Unit Pengembangan IKM	Jumlah sarana dan prasarana	Jawa Barat	75%	1,200,000	APBD Provinsi		75%	1,200,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Bandung	Jumlah sarana dan prasarana	Bandung	75%	934,668	APBD Provinsi		75%	934,668
1	20	62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;								
			01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	Jumlah sarpras paratur yang dipelihara	Bandung	92%	1,600,000	APBD Provinsi		95%	1,600,000
			02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekranasda	Jumlah sarpras paratur yang dipelihara	Bandung	92%	750,000	APBD Provinsi		95%	750,000
			03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Tasikmalaya	Jumlah sarpras paratur yang dipelihara	Tasikmalaya	92%	550,670	APBD Provinsi		95%	550,670
			04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Cirebon	Jumlah sarpras paratur yang dipelihara	Cirebon	92%	563,130	APBD Provinsi		95%	563,130
			05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Bogor	Jumlah sarpras paratur yang dipelihara	Bogor	92%	1,030,600	APBD Provinsi		95%	1,030,600
			06	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Karawang	Jumlah sarpras paratur yang dipelihara	Karawang	92%	1,500,000	APBD Provinsi		95%	1,500,000
			07	Pemeliharaan dan Fasilitas Gedung Kantor Baperin dan Sub Unit serta Rumah Kamasan	Jumlah sarpras paratur yang dipelihara	Jawa Barat	92%	5,000,000	APBD Provinsi		95%	5,000,000
			08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrolgian Bandung	Jumlah sarpras paratur yang dipelihara	Bandung	92%	994,970	APBD Provinsi		95%	994,970
1	20	66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;								

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			01	Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah dokumen yang disusun	Jawa Barat	6 dokumen	433,200	APBD Provinsi		6 dokumen	433,200
1	24			Statistik								
1	24	79		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
			01	Pendataan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah kabupaten/kota yang didata	Jawa Barat	27 Kab./Kota	819,000	APBD Provinsi		27 Kab./Kota	819,000
2				Pilihan								
2	31			Perindustrian								
2	31	91		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
			01	Pengembangan IKM Bidang ILMATATTEL	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			02	Pengembangan IKM Bidang IAKK	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			03	Peningkatan Kemampuan IKM Bidang Agro	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			04	Pelatihan Kerajinan untuk Dukungan Souvenir di Venue PON 2016 di 5 Lokasi	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	689,330	APBD Provinsi		20%	689,330
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10

			05	Fasilitasi dalam mendukung Jabar Motekar (Bantuan Barang/Peralatan dan Sosialisasi)	Peningkatan Nilai Produksi IKM	<p>Sudiman Konveksi Desa/Kel. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;</p> <p>Rajum Konveksi Desa/Kel. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;</p> <p>N'Qiyya Creative Jatisari Timur RT.03/10 Desa/Kel. Karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;</p> <p>KONVEKSI H. UDIN Dusun Pasirtalaga RT. 005/002 Desa/Kel. Pasirtalaga Kec. Talagasari Kab.</p>	15%	3,000,000	APBD Provinsi		20%	3,000,000
--	--	--	----	---	--------------------------------	--	-----	-----------	---------------	--	-----	-----------

[illegible]

[illegible]

						003/004 Desa/Kel. Talagasari Kec. Talagasari Kab. Karawang; RIDHO Dusun Krajan I RT. 002/001 Desa/Kel. Majalaya Kec. Majalaya Kab. Karawang; ANEKA SARI Perum Puri Kosambi I Blok YY/11 Desa/Kel. Duren Kec. Klari Kab. Karawang; BAKPIA 'HNR' Perum Puri Kosambi I Blok AG/2 Desa/Kel. Duren Kec. Klari Kab. Karawang; KAPILAH Krajan I RT. 06/02						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Desa/Kel. Kedawung Kec. Lemahabang Kab. Karawang; LIDIA SNACK Kp. Cicangor RT. 02/03 Desa/Kel. Belendung Kec. Klari Kab. Karawang; KATINEUNG RASA Jl. Sanggabuan a No. IA Perum Karang Indah Desa/Kel. Karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kab. Karawang; Q-ta Q-ta Dusun Margasalam RT. 005/006 Desa/Kel. Karyamukti Kec. Lemahabang Kab.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				Karawang; PUTRI Perum Margasari Permai E/1 RT. 016/004 Desa/Kel. Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang; Aya Aneka Kue Krajan RT. 02/04 Desa/Kel. Tanjungmek ar Kec. Karawang Barat Kab. Karawang; Opak Kawung Dusun Gempol Girang RT. 08/05 Desa/Kel. Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang; Sinar Kp. Kalioyod RT. 02/03				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Desa/Kel. Wancimekar Kec. Kotabaru Kab. Karawang; Weebee Brownies Sukamaju RT. 13/03 Desa/Kel. Warungbam bu Kec. Karawang Timur Kab. Karawang; Mila Putra Mandiri Perum Rawamas F 8/11 Desa/Kel. Jomin Timur Kec. Kotabaru Kab. Karawang; AL - Hiaqi Jln. Jend Sudirman, Gg. Kulit No. 39 Desa/Kel. Cikampek Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang;						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

[illegible]

				Rengasdeng klok Utara Kec. Rengasdeng klok Kab. Karawang; LICCA SNACK Kosambi II RT. 025/007 Desa/Kel. Duren Kec. Klari Kab. Karawang; KAROMAH Kp. Majalaya RT. 01/01 Desa/Kel. Majalaya Kec. Majalaya Kab. Karawang; SAKUM COLLECTION Desa/Kel. Jomin Barat Kec. Kotabaru Kab. Karawang; ROLLY BABY Dusun Warung Karya Desa/Kel. Waringinkary				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					a Kec. Lemahabang Kab. Karawang; BANSTAR Perum Puri Anggrek Desa/Kel. Wancimekar Kec. Kotabaru Kab. Karawang; BANSTAR Perum Puri Anggrek H3 No. 1 Desa/Kel. Wancimekar Kec. Kotabaru Kab. Karawang; ABAN Perum Puri Anggrek Desa/Kel. Wancimekar Kec. Kotabaru Kab. Karawang; RUMAH JAKET KULIT Perum sARI iNDAH nO. 22 rt. 04/19					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						Desa/Kel. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang; ARD Dusun Puloharapan RT. 04/02 Desa/Kel. Kampungsa wah Kec. Jayakarta Kab. Karawang; UTAMI BORDI Anjun Kanoman Desa/Kel. Karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kab. Karawang; KHORUNNIS A Kp. Krajan Desa/Kel. Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang; INBHOCI Kp. Mekarjaya						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						RT. 01/05 Desa/Kel. Cikampek Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang; Sari R						
			06	Jabar Otofest	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Bandung	15%	1,000,000	APBD Provinsi		20%	1,000,000
			07	Fasilitasi Kerjasama Industri dan Pengembangan Ekosistem Industri Unggulan Jawa Barat	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	600,000	APBD Provinsi		20%	600,000
			08	Penguatan Industri Berbasis Fashion	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Bandung	15%	400,000	APBD Provinsi		20%	400,000
			09	Pengembangan Industri Berbasis Logam, Teknologi Informasi dan Elektronika	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Bandung	15%	300,000	APBD Provinsi		20%	300,000
			10	Jabar Ngagaya	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Bandung	15%	1,700,000	APBD Provinsi		20%	1,700,000
			11	Kajian Analisis Pemetaan Industri Manufaktur di Jawa Barat	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Bandung	15%	50,000	APBD Provinsi		20%	50,000
			12	Pengujian Garam Beryodium di Tingkat Produsen Garam Beryodium	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Indramayu	15%	80,000	APBD Provinsi		20%	80,000
			13	Pengembangan Industri Bata Merah	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Kab. Garut; Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Kab. Garut;Kab. Sukabumi;Ka b. Sukabumi;	9.000	200,000	APBD Provinsi		12.000	200,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			14	Dukungan Pameran Keramik dan Gerabah	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Purwakarta	15%	140,000	APBD Provinsi		20%	140,000
			15	Pengembangan Makanan Olahan Berbahan Baku Lokal di Wilayah II	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Wil II BKPP	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			16	Dukungan Kompetisi Desain Produk Furniture/Meubel Rotan	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Cirebon	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			17	Dukungan Sertifikasi Halal Produk Industri Kecil Menengah (IKM)	Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	Jawa Barat	3.000	2,660,000	APBD Provinsi		3.500	2,660,000
			18	Penyelenggaraan Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Bandung	15%	1,800,000	APBD Provinsi		20%	1,800,000
			19	Penguatan Standarisasi Mutu IKM Pengolahan Pangan	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			20	Optimalisasi Layanan Mobil Kemasan	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Bandung	15%	200,000	APBD Provinsi		20%	200,000
			21	Optimalisasi Layanan Rumah Kemasan dan Fasilitas Layanan Kemasan Produk IKM	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	1,000,000	APBD Provinsi		20%	1,000,000
2	31	92		Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri								
			01	GCB - Pelatihan Manajemen dan Teknologi Produksi yang Ramah Lingkungan di Wilayah Citarum	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	300,000	APBD Provinsi		20%	300,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			02	Pelatihan Industri Garmen	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Jawa Barat	9.000	550,000	APBD Provinsi		12.000	550,000
			03	Pelatihan Desain Anyaman di Kampung Kreatif	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Kab. Tasikmalaya; Kab. Tasikmalaya; Kab. Tasikmalaya; Kab. Tasikmalaya;	15%	240,000	APBD Provinsi		20%	240,000
			04	Pelatihan Pembuatan Cenderamata Destinasi Wisata Kampung Toga Sumedang	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Kab. Sumedang; Kab. Sumedang;	9.000	240,000	APBD Provinsi		12.000	240,000
			05	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kertas	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Jawa Barat	9.000	150,000	APBD Provinsi		12.000	150,000
			06	GCB - Pelatihan Kerajinan Bambu	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Kab. Bandung; Kab. Bandung;	15%	160,000	APBD Provinsi		20%	160,000
			07	Pelatihan Kerajinan Bambu	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Kab. Subang; Kab. Majalengka; Kab. Ciamis; Kab. Subang; Kab. Majalengka; Kab. Ciamis;	15%	240,000	APBD Provinsi		20%	240,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			08	Pelatihan Kerajinan Batu Mulia	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Jawa Barat	9.000	240,000	APBD Provinsi		12.000	240,000
			09	Pelatihan Pembuatan Sepatu	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Jawa Barat	9.000	210,000	APBD Provinsi		12.000	210,000
			10	Pelatihan Teknologi Produksi Garam Krosok dengan Sistem Intensifikasi (RAMSOL)	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Kab. Cirebon; Kab. Indramayu; Kab. Cirebon;Kab. Indramayu;		200,000	APBD Provinsi		20%	200,000
			11	Pelatihan Teknologi Penyamakan Kulit Artikel Crazy Horse Bahan Sepatu dan Tas	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	120,000	APBD Provinsi		20%	120,000
			12	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Genteng di Kabupaten Majalengka	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Kab. Majalengka; Kab. Majalengka; Kab. Majalengka; Kab. Majalengka;	9.000	180,000	APBD Provinsi		12.000	180,000
			13	Pelatihan Peningkatan Usaha IKM Keramik dan Gerabah	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	180,000	APBD Provinsi		20%	180,000
			14	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Bahan Baku Standar	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	180,000	APBD Provinsi		20%	180,000
			15	Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Kab. Garut	15%	120,000	APBD Provinsi		20%	120,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Produksi Olahan Pangan	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			17	Workshop Pengembangan Desain Unggulan Furniture/Meubel	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			18	Pelatihan Pengembangan Industri Furniture/Meubel	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			19	Bimbingan Teknis Produk Olahan Berbasis Kopi, Teh dan Coklat	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			20	Peningkatan Kemampuan Teknologi dan Layanan Sub Unit	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			21	Bimbingan Teknis Standarisasi Olahan Pangan Berbasis Produk Peternakan	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			22	Bimtek Standarisasi Mutu Produk Olahan Berbahan Baku Lokal	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			23	Bimbingan Teknis Produk Olahan Berbasis Buah	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	500,000	APBD Provinsi		20%	500,000
			24	Pelatihan Desain Anyaman	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Jawa Barat	15%	160,000	APBD Provinsi		20%	160,000
2	31	93		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;								
			01	Peningkatan Kemampuan UKM Bidang Perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan	Jawa Barat	15 buah	500,000	APBD Provinsi		20 buah	500,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			02	Pelayanan Informasi Harga Kepokmas	Terkendalinya inflasi Jawa Barat	Jawa Barat	Inflasi Jawa Barat<Inflasi Nasional	100,000	APBD Provinsi		Inflasi Jawa Barat<Inflasi Nasional	100,000
			03	Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan	Kalimantan Barat;Sulawesi Utara;Nusa Tenggara Barat;Nusa Tenggara Barat;	15 buah	600,000	APBD Provinsi		20 buah	600,000
			04	Peningkatan Pemasaran Melalui Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Jumlah kerjasama perdagangan	Jawa Barat	15 buah	1,000,000	APBD Provinsi		20 buah	1,000,000
			05	Pengembangan Pasar Kerajinan Pada Inacraft	Jumlah kerjasama perdagangan	Jakarta	15 buah	500,000	APBD Provinsi		20 buah	500,000
			06	Pengembangan Manajemen Usaha Bagi Pedagang	Jumlah kerjasama perdagangan	Jawa Barat	15 buah	500,000	APBD Provinsi		20 buah	500,000
			07	Forum Komunikasi Perpupukan Di Jawa Barat	Jumlah kerjasama perdagangan	Jawa Barat	15 buah	200,000	APBD Provinsi		20 buah	200,000
			08	Pengembangan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Jawa Barat	Jumlah kerjasama perdagangan	Jawa Barat	15 buah	400,000	APBD Provinsi		20 buah	400,000
			09	Prognosa Kebutuhan Pokok Masyarakat di Jawa Barat	Terkendalinya inflasi Jawa Barat	Bandung	15 buah	100,000	APBD Provinsi		20 buah	100,000
			10	Pengembangan Pasar Lelang di Jawa Barat	Jumlah kerjasama perdagangan	Bandung	15 buah	400,000	APBD Provinsi		20 buah	400,000
			11	Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas di Jawa Barat	Terkendalinya inflasi Jawa Barat	Jawa Barat	Inflasi Jawa Barat<Inflasi Nasional	1,500,000	APBD Provinsi		Inflasi Jawa Barat<Inflasi Nasional	1,500,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			12	Pengembangan Pasar Rakyat dan Festival Pasar Rakyat	Jumlah revitalisasi pasar tradisional	Jawa Barat	25 unit	4,500,000	APBD Provinsi		30 unit	4,500,000
2	31	94		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;								
			01	Pelatihan Strategi Pemasaran Ekspor Produk Hasil tanhut	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	Jawa Barat	3%	150,000	APBD Provinsi		3%	150,000
			02	Identifikasi Potensi Ekspor Produk Tanhut dan Penelusuran Asal Barang Ekspor Tanhut	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	Jawa Barat	3%	100,000	APBD Provinsi		3%	100,000
			03	Pelatihan akses dan survey Pasar melalui Internet untuk pasar ekspor produk hasil Tanhut	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	Jawa Barat	3%	200,000	APBD Provinsi		3%	200,000
			04	Pelatihan Prosedur Ekspor Produk Hasil Tanhut	Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun	Jawa Barat	3%	150,000	APBD Provinsi		3%	150,000
			05	Monitoring dan Verifikasi Pemegang Angka Pengenal Importir (API)	Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	Jawa Barat	2,5%	158,000	APBD Provinsi		2,5%	158,000
			06	Forum Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Impor di Jawa Barat	Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	Jawa Barat	2,5%	175,000	APBD Provinsi		2,5%	175,000
			07	Bimbingan Teknis Pemahaman Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) Indonesia Bagi Eksportir di Jawa Barat	Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun	Jawa Barat	3%	420,000	APBD Provinsi		3%	420,000
			08	Verifikasi dan Penelusuran Asal Barang Ekspor Jawa Barat	Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	3%	100,000	APBD Provinsi		3%	100,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			09	Penyusunan Petunjuk Pasar Ekspor ke Negara Non Tradisional (Timur Tengah)	Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun	Jawa Barat	3%	97,000	APBD Provinsi		3%	97,000
			10	Penyusunan Data Base Importir Jawa Barat	Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	Jawa Barat	2,5%	100,000	APBD Provinsi		2,5%	100,000
			11	Pelatihan Ekspor untuk Pemula	Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun	Jawa Barat	3%	150,000	APBD Provinsi		3%	150,000
			12	Forum Kinerja Ekspor Jawa Barat	Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun	Bandung	3%	200,000	APBD Provinsi		3%	200,000
			13	Peningkatan Akses Pasar ke Luar Negeri	Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun	Asia/Timur tengah	3%	1,500,000	APBD Provinsi		3%	1,500,000
2	31	95		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan								
			1	Peningkatan Pemahaman Wawasan Perlindungan Konsumen	Jumlah UTTP dan BDKT	Kab. Bandung Barat; Kab. Garut; Kab. Pangandaran ; Kab. Subang; Kab. Sukabumi; Kab. Bandung Barat; Kab. Garut; Kab. Pangandaran ; Kab. Subang; Kab. Sukabumi;	UTTP : 6.430.988 buah BDKT : 1.614 buah	700,000	APBD Provinsi		UTTP : 6.623.917 buah BDKT : 1.662 buah	700,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2	Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Balai Kemetrolagian Tasikmalaya	Jumlah UTTP dan BDKT	Tasikmalaya	UTTP : 6.430.988 buah BDKT : 1.614 buah	120,000	APBD Provinsi		UTTP : 6.623.917 buah BDKT : 1.662 buah	120,000
			3	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolagian Balai Kemetrolagian Balai Kemetrolagian Tasikmalaya	Jumlah UTTP dan BDKT	Wilayah Tasikmalaya	UTTP : 6.430.988 buah BDKT : 1.614 buah	1,200,000	APBD Provinsi		UTTP : 6.623.917 buah BDKT : 1.662 buah	1,200,000
			4	Pengawasan Barang Beredar di Pasar	Jumlah UTTP dan BDKT	Jawa Barat	UTTP : 6.430.988 buah BDKT : 1.614 buah	1,200,000	APBD Provinsi		UTTP : 6.623.917 buah BDKT : 1.662 buah	1,200,000
			5	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrolagian Cirebon	Jumlah UTTP dan BDKT	Wilayah Cirebon	UTTP : 6.430.988 buah BDKT : 1.614 buah	1,234,500	APBD Provinsi		UTTP : 6.623.917 buah BDKT : 1.662 buah	1,234,500
			6	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrolagian Bogor	Jumlah UTTP dan BDKT	Wilayah Bogor	UTTP : 6.430.988 buah BDKT : 1.614 buah	2,291,250	APBD Provinsi		UTTP : 6.623.917 buah BDKT : 1.662 buah	2,291,250
			7	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Laboratorium Balai Kemetrolagian Bogor	Jumlah UTTP dan BDKT	Bogor	UTTP : 6.430.988 buah BDKT : 1.614 buah	390,000	APBD Provinsi		UTTP : 6.623.917 buah BDKT : 1.662 buah	390,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolagian Balai Kemetrolagian Karawang	Jumlah UTTP dan BDKT	Wilayah Karawang	UTTP : 6.430.988 buah BDKT : 1.614 buah	1,800,000	APBD Provinsi		UTTP : 6.623.917 buah BDKT : 1.662 buah	1,800,000
			9	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolagian Balai Kemetrolagian Bandung	Jumlah UTTP dan BDKT	Wilayah Bandung	UTTP : 6.430.988 buah BDKT : 1.614 buah	1,667,852	APBD Provinsi		UTTP : 6.623.917 buah BDKT : 1.662 buah	1,667,852
								98,160,000				98,160,000

BAB IV PENUTUP

Perencanaan pembangunan daerah provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan tahunan nasional dan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan tahunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahunan atas Renstra Dinas Perindag Prov. Jabar Tahun 2013-2018 yang selaras dengan amanat RPJMD Jabar 2013 – 2018 dan RKPD Jabar Tahun 2016, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 yang selanjutnya dielaborasi dalam RENSTRA Kementerian Perindustrian dan RENSTRA Kementerian Perdagangan, telah berpengaruh terhadap tahapan-tahapan prioritas kegiatan sehingga perlu adanya inovasi dan kreasi dalam upaya pemecahan masalah dan penanggulangan isu-isu strategis yang relevan dengan urusan bidang industri dan perdagangan. Pola-pola pembagian peran sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 hendaknya dapat dilakukan secara optimal dalam pelaksanaan urusan bidang industri dan perdagangan secara sektoral.

Renja 2016 Dinas Perindag. Provinsi Jawa Barat merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD, sehingga harus terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran, untuk itu berbagai permasalahan dan target yang akan dicapai pada akhir tahun 2016 akan ditentukan oleh rencana kegiatan tahun 2016, sehingga Renja ini harus memuat isu strategis, prioritas program/kegiatan, dan rencana kerja baik yang dilaksanakan langsung oleh Provinsi maupun Kab./Kota yang ditempuh dengan

dukungan stakeholder. Bila dikaitkan dengan perencanaan tahunan Kabupaten/Kota, Renja Provinsi bisa dijadikan pedoman atau acuan untuk penyusunan Renja Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan RENJA ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan kegiatan/program yang belum tuntas pada tahun sebelumnya sehingga untuk beberapa kegiatan masih merupakan kelanjutan. Disamping itu, masukan dari Dinas yang membidangi sektor industri dan perdagangan di daerah Kab/Kota sedapat mungkin disinkronkan kedalam tematik kewilayahan apabila bobot urusan tersebut berada dalam Wilayah pemerintahan daerah Kabupaten /Kota.

Keberhasilan implementasi RENJA ini pada dasarnya akan sangat tergantung kepada komitmen segenap unsur pimpinan dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat serta semua stakeholders.

Untuk itu diharapkan kepada semua pihak/institusi yang terlibat pada urusan industri dan perdagangan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi untuk mendorong peningkatan peran industri dan perdagangan yang selanjutnya dapat berdampak kepada penurunan jumlah penduduk miskin, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat pada tahun 2016.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja 2016 ini dapat dijadikan sebagai berikut :

1. Pedoman operasional dan pembuatan kebijakan bagi aparatur pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengembangan urusan industri dan perdagangan.
2. Arah dan rujukan yang bergerak di urusan industri dan perdagangan termasuk stakeholder, sehingga tercipta kolaborasi serta sinergi yang positif.
4. Tolok-ukur pencapaian program/kegiatan Dinas Perindag Prov. Jabar.

5. Sumber informasi tentang rencana kerja yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengembangan urusan industri dan perdagangan.

Lampiran

**USULAN HIBAH/BANSOS DARI MASYARAKAT TAHUN 2016
MELALUI RKPD ONLINE (EXTERNAL OPD)**

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	APBD Prov	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Sarana Alat Pengolahan Batu Mulia a.n. Kel Pengrajin Industri Batu Aji BINA PERMATA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	583,900,000	
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan dana usaha bidang Pengrajin Sapu Ijuk	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100,000,000	
3	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan modal usaha bidang kerajinan piring lidi a.n. KUBE MELATI MANDIRI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Pelatihan Masyarakat bidang Teknisi Komputer dan Jaringan a.n. YASPEND/LPK JAYA COMP	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	150,000,000	
5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Sarana Usaha Pemberdayaan Masyarakat bidang Teknisi Komputer a.n. LPK MADANI COMPUTER SERVICE EDUCATION	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	40,000,000	
6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan dana usaha Rajut dan Konveksi a.n. Kelompok Usaha Rajut SARIMBIT	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	181,100,000	
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Penambahan Dana Produksi a.n. KELOMPOK USAHA WANITA MANDIRI (SIMPING & SEMPRONG)	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	549,400,000	
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Penambahan Dana Produksi a.n. KEL USAHA BATU POLES SUISEKI ALAM JAYA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	272,500,000	
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Bantuan modal usaha a.n. KELOMPOK PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERKAH JAYA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	35,607,200	
10	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Dan ahibah a.n. DEKRANASDA PROV JABAR	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	2,000,000,000	
11	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-Bantuan modal usaha a.n. Zikri Snack Box	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100,000,000	
12	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Modal Usaha Mebeul a.n. KEL USAHA MEBEUL WANA LESTARI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	125,000,000	
13	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Penguatan Modal Usaha Produksi Aneka Kripik a.n. KEL USAHA BRSAMA EFTIGA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	75,000,000	
14	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan dana untuk Produksi Bata Pres a.n. KEL USAHA JAYA MEKAR	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	53,950,000	
15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan modal usaha Mebeul a.n. KEL USAHA MEBEUL SYIFA BERSAUDARA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	53,950,000	
16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Pengadaan Peralatan a.n. Felkom Felia Komputer	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	59,500,000	
17	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Modal IKM Makanan Olahan Kerupuk a.n. Kelompok Usaha Bersama KERUPUK H. SYAMSOERI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	59,500,000	
18	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Mesin/Peralatan IKM Konveksi a.n. Kelompok Usaha Bersama Berkah Konveksi	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
19	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Mesin/Peralatan IKM Konveksi a.n. Kel. Usaha Bersama SULAM BERSAMA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
20	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan KBU Anyaman Limbah Pisang PKBM SUKATANI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	37,500,000	

1	2	3	4	5	6
21	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Mesin/Peralatan IKM Konveksi a.n. Kelompok Usaha Bersama RAPIH TAILOR	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
22	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium a.n. Kelompok Usaha Bersama KUBE CIPEUCANG MANDIRI KARYA (CMK)	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	223,546,000	
23	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan dana Bengkel Las a.n. Kelompok Usaha Bersama KUBE BINA KARYA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	59,794,000	
24	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Hibah Kewirausahaan Berbasis Telematika a.n. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan NUGRAHA COLLEGE	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	150,000,000	
25	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Pengadaan Alat Produksi Olahan Keripik Singkong/Pisang a.n. Kelompok Usaha Bina Insani Purna TKI Purwakarta	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	375,000,000	
26	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Peralatan IKM Keripik a.n. Kelompok Usaha Bersama SARI RASA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	25,000,000	
27	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Permodalan usaha Kue Kering a.n. KUB BUNGSU MANDIRI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	25,000,000	
28	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Dana Peralatan a.n. Kelompok Usaha Bersama RAJUT JAYA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	25,000,000	
29	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	- Bantuan Mesin/Peralatan Konveksi a.n. Kel Usaha Bersama ISTRI BINANGKIT	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	46,400,000	
30	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan modal usaha Sablon & Digital Printing a.n. KUBE BERSEKA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	62,000,000	
31	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan usaha untuk produksi kripik buah a.n. Kel Usaha Kripik Buah-buahan LUMBA-LUMBA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100,000,000	
32	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Modal Industri Kecil Menengah (IKM) a.n. Kelompok Usaha Bersama SARI ASIH	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	25,000,000	
33	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Modal Usaha Warnet a.n. Kelompok Belajar Bersama A & D Computer	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	99,550,000	
34	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Mesin/Peralatan IKM Konveksi a.n. NKM (Nurul Kamal Mandiri) Products	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
35	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	- Bantuan dana usaha dagang rumah makan a.n. KUBE KARYA BERSAMA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	54,929,000	
36	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	- Bantuan dana untuk usaha dagang a.n. KUBE RUKUN	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	150,000,000	
37	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	- Bantuan Dana Permodalan Perabotan Pecah Belah a.n. KUBE HM JAYA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	124,705,000	
38	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan dana usaha Produksi Es Yoghurt a.n. Kelompok Usaha ICE YOGHURT SARINAH	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	78,305,000	
39	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan dana Usaha Konveksi a.n. KUBE DIANA COLLECTION	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	700,000,000	
40	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan Dana dibidang Percetakan a.n. Kelompok Usaha Bersama (KUB) CIPTA ADVERTISING	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	193,175,000	
41	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan modal usaha untuk makanan olahan a.n. Kelompok Usaha Bersama RIZKI ILAHI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	60,000,000	
42	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-Bantuan dana Hibah a.n. Kelompok Usaha Konveksi Permata Tunggal	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	253,500,000	

1	2	3	4	5	6
43	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan dana pengolahan Sale Pisang a.n. KUBE AMH MANDIRI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	54,765,000	
44	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	- Bantuan Tenda & Gerobak a.n. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Dewan Pimpinan Kota Cirebon	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	1,800,000,000	
45	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	- Bantuan Usaha Perdagangan a.n. Kelompok Usaha Bersama JASMINE	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	70,620,000	
46	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	- Bantuan dana untuk peratan mesin Foto Copy dll a.n. KUB NETRAL ADVERTISING	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	160,750,000	
47	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan dana untuk peralatan mesin a.n. Kelompok Usaha Bersama BIMA HANDYCRAFT	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	28,000,000	
48	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan dana hibah dan peralatan mesin a.n. kukm hikmah	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	120,360,000	
49	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	- Bantuan dana hibah dan peralatan mesin a.n. KUBE ALIAYA COLLECTION	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	150,000,000	
50	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	- Bantuan peralatan salon kecantikan a.n. Kelompok Usaha Jasa Kecantikan TIEN'S SALON	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,350,000	
51	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Permodalan usaha makanan a.n. KUBE MAJU JUNUN	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	110,808,000	
52	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;	Bantuan Sarana dan Prasarana Kementrologian Kab. Indramayu	- Dinas Koperindag Kab. Indramayu Jl. MT. Haryono No. 11/B Desa/Kel. Telukagung Kec. Indramayu Kab. Indramayu; Telukagung; Indramayu;	129,060,000	
53	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Relokasi/Revitalisasi Pasar Tradisional Pasar Daerah Jatibarang	Pasar didaerah Jatibarang Blok Sojar Desa/Kel. Bulak Kec. Jatibarang Kab. Indramayu; Bulak;	31,000,000,000	
54	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Permohonan Bantuan Peralatan Produksi Bata Merah a.n. Koperasi Serba Usaha (KSU) SURYA MELATI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	1,217,250,000	
55	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	- Permohonan Bantuan Modal Usaha a.n. Kelompok Usaha Kecil Konveksi dan Penjahit JASA SALUYU	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	47,398,000	
56	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Permohonan Bantaun Modal Usaha Percetakan dan Sablon a.n. KELOMPOK USAHA PERCETAKAN DAN SABLON BINANGKIT JAYA KAMASAN BANJARAN	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	36,430,000	
57	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	- Permohonan Bantuan Mesin/Peralatan Industri Konveksi a.n. KUBE JAYA MANDIRI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	54,250,000	
58	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Permohonan Bantuan Alat dan Mesin a.n. Kelompok Tani Domisil CAHAYA SEJAHTERA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	235,200,000	
59	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Usaha produksi dan perdagangan pengadaan bahan Produksi kerupuk sanggray a.n. KUBE KERUPUK SANGGRAY	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100,000,000	
60	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Pengembangan Usaha Pemberdayaan Masyarakat melalui Kewirausahaan a.n. PANTI ASUHAN YAYASAN AMAL MULIA KUNINGAN	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100,000,000	
61	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Permohonan Bantuan Usaha Meubeler a.n. SALUYU	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	59,400,000	
62	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Bantuan modal industri bidang usaha kue bolu	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	25,000,000	
63	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Permodalan Pengrajin Alas Kaki "KARYA MUDA"	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	

1	2	3	4	5	6
64	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Permohonan Perbaikan Jalan di Lingkungan Sub Unit PIKM Logam Bandung	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	300,000,000	
65	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Permohonan Bantuan Alat/mesin pengolah kopi .n GAPOKTAN KOPI ARJUNA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	165,000,000	
66	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kelompok Usaha Bersama Pengrajin Batik Tradisional Cirebon	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
67	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-Bantuan Modal Usaha a.n. KUB Konfeksi Al-Baaqi	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	70,900,000	
68	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	-Bantuan Modal Usaha a.n. SETIYA MUSIK	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	1,311,550,000	
69	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	-Permohonan Bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional Prapatan Pemerintah Kab. Majalengka Dinas KUKM Perindag Kab. Majalengka	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	1,311,550,000	
70	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-Permohonan Modal Usaha a.n. Kelompok Usaha Bersama Pengrajin Batik Tradisional Cirebon	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
71	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Permohonan Bantuan Dana a.n. Kelompok Usaha Konveksi Karya Usaha	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	108,300,000	
72	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Modal Usaha a.n. Kel Usaha Aneka Abon Ikan Bina Bahari	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	516,600,000	
73	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Dana dan Peralatan a.n. Kel Usaha Industri Kecil Menengah Kresna Multi Produk	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	516,600,000	
74	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Modal Usaha a.n. Kel Usaha Astrid Eggrol Produk	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	426,400,000	
75	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	KUBE ISTRI BINANGKIT Permohonan Bantuan Modal Pengembangan Usaha Kerupuk	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	20,000,000	
76	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ligar Pengajuan Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Perempuan 2014 "Kelompok Usaha Sanding"	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	21,850,000	
77	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kel Usaha Pengolahan Susu Serba Susu Lembang	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	1,499,000,000	
78	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kel Usaha Perbengkelan SELEKTA MOTOR	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	36,650,000	
79	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Bantuan Kelompok Usaha Multimedia Permohonan Bantuan Modal Usaha pelayanan Internet dan Jasa Multimedia	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	90,000,000	
80	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Kel Usaha Bersama Kolektif Anak Kampung	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	25,000,000	
81	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kel Usaha KUE The Sweetest Cookies	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	30,000,000	
82	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Kel Usaha BAGJA RAHARJA Permohonan Permodalan Usaha Warung Kelontongan	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	25,000,000	
83	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kel. Usaha Perbengkelan & Cuci Motor BJM (Bandung Jaya Motor)	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	83,600,000	
84	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kelompok usaha perempuan wanita mandiri	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	162,600,000	
85	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Kelompok usaha kelontongan berkah abadi	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	80,000,000	
86	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Kelompok usah klontongan barokah	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	101,140,000	
87	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	KUB Mekar Jaya	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100,000,000	

1	2	3	4	5	6
88	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kelompok usaha aneka abon ikan BINA BAHARI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	307,000,000	
89	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	KUB MAJU BERSAMA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	243,000,000	
90	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	KUKM Mandiri 2 Permohonan Bantuan Dana	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
91	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kelompok pengrajin tikar mendong SAUYUNAN	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	300,000,000	
92	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	kelompok industri kecil menengah (KUB) Sejahtera Bersama	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	98,535,000	
93	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	SETIYA MUSIK permohonan bantuan dana	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100,000,000	
94	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kelompok Usaha Wanita Mandiri permohonan bantuan penambahan dana produksi	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
95	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Pemerintah Kab, Majalengka Dinas KUKM perindag Kab. Majalengka	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	1,311,550,000	
96	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kelompok Usaha Bersama (KUB) PARAHIANGAN	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	30,000,000	
97	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kel. Pemberdayaan Perempuan Cemara Pengajuan dan Pengelolaan dDana Program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	20,100,000	
98	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan dana a.n. Kelompok Usaha Bawang Goreng SAUYUNAN	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100,000,000	
99	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Bantuan dana a.n. Kelompok Usaha Kelontongan Makmur Sejahtera	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	75,000,000	
100	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan modal a.n. Kelompok Pemuda Otomotif 588	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	160,000,000	
101	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan modal a.n. Kelompok Usaha Bersama MEKAR	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	25,000,000	
102	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Modal pengolahan buah kelapa a.n. MULYA JAYA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	175,000,000	
103	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Bantuan modal a.n. Kelompok Kesejahteraan Masyarakat (KKM) Pedagang Kecil	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100,000,000	
104	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan dana a.n. KUB Konveksi Al-baaqi	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	70,900,000	
105	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan dana a.n. Kelompok KS Pengrajin Genteng	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	78,000,000	
106	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kelompok Pemberdayaan PerempuanHerbofia Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	42,800,000	
107	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengajuan Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Perempuan 2014 "Barokah Jaya"	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	21,850,000	
108	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Permohonan Bantuan Modal Usaha KUBE "Jual Beli Jagung"	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	31,700,000	
109	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Permohonan Bantuan Modal Usaha KUBE "Jarkasih"	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	333,900,000	
110	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Srikandi Permohonan Bantuan Modal KUBE Produksi Olahan Makanan Ringan "Aneka Kripik"	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	30,000,000	
111	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Permohonan bantuan dana kelompok usaha kecil dan menengah pengrajin tas sekolah Mandiri	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
112	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengrajin Batik Tradisional Cirebon	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
113	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Permohonan Bantuan Modal Kelompok Usaha Kecil "RAPEKAN"	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	126,000,000	

1	2	3	4	5	6
114	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Permohonan Bantuan Modal Usaha Bersama (KUBE) "Bina Usaha Mandiri" usaha makanan ringan telur gabus	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100,000,000	
115	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Kelompok Usaha Bersama Pedagang Kaki Lima Pujasera Permohonan Perbaikan Sarana Perdagangan	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	98,900,000	
116	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan dana UKM a.n. Sukses Damai Mandiri	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	174,000,000	
117	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kelompok Usaha Bersama Pisang Jaya Mandiri	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	37,400,000	
118	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Permohonan bantuan modal usaha konpeksi pakaian kube sabilulungan	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
119	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kel Usaha Bersama (KUBE) Bina Usaha Pengajuan Bantuan Dana Program	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	189,310,000	
120	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Sukabumi City Fest 2014	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	1,373,700,000	
121	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Pengembangan Usaha Bakso a.n. Kelompok Pedagang Bakso PENDOWO	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	81,750,000	
122	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Bantuan Modal Usaha a.n. Kel. Usaha Bersama (KUBE) MOTEKAR	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	40,000,000	
123	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Modal Usaha produksi keripik singkong a.n. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) BALADO	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
124	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan dana a.n. Kelompok usaha Konveksi MANDIRI USAHA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	105,000,000	
125	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pengajuan Pembinaan dan Penambahan Modal Penjahit Kel. Usaha Bersama (KUBE) Penjahit Sariksa	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	135,000,000	
126	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan dana a.n. Kelompok Usaha Sablon Faddilah	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	100,000,000	
127	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Menengah Usaha Jual Beli Gabah Usaha Kecil Menengah Makmur Tani	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
128	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Permohonan bantuan dana kelompok usaha konveksi karya usaha	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	108,300,000	
129	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kel. Tani Mandiri Tani Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Menengah Usaha Jual Beli Gabah	Desa/Kel. Dungusiku Kec. Leuwigoong Kab. Garut; Dungusiku; Leuwigoong; Kab. Garut;	50,000,000	
130	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Pembiayaan bagi UKM Usaha Produksi Rengginang Kel. Wanita Tani Melati	Desa/Kel. Dungusiku Kec. Leuwigoong Kab. Garut; Dungusiku; Leuwigoong; Kab. Garut;	50,000,000	
131	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Kel. Tani Sinar Pagi Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Menengah Usaha Jual Beli Gabah	Desa/Kel. Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut; Cibiuk Kaler; Cibiuk; Kab. Garut;	50,000,000	
132	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Pengembangan UsahaKonveksi a.n. KUBE ANUGRAH	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	257,000,000	
133	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Pelatihan dan Pengembangan Usaha a.n. Kel Usaha Pemuda Produktif (KUPP) MOTEKAR	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	50,000,000	
134	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Bantuan Modal Usaha Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemasaran Produk Pakaian a.n, Yayasan Rumah Impian	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	168,900,000	
135	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Bantuan Penambahan Modal Usaha a.n. Kel Usaha Hasil tani Masyarakat RODA TANI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	155,200,000	

1	2	3	4	5	6
136	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Dana Pelatihan Teknis Subtantif UKM Bordir Kota Tasikmalaya a.n. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	200,000,000	
137	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Modal usaha Produksi Payung geulis dan Kerajinan Bambu a.n. Kadis Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindag Kota Tasikmalaya	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	300,000,000	
138	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Modal usaha a.n. Kel. Usaha ASTRID EGGROLL PRODUK	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	426,400,000	
139	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Modal usaha a.n. Kel Usaha Industri Kecil Menengah INDRA MULTI PRODUK MANISAN MANGGA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	190,000,000	
140	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Modal Usaha a.n. Kel. Sejahtera Rengginang	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	300,000,000	
141	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan modal usaha dan peralatan a.n. Kel. Usaha Aneka Abon Ikan BINA BAHARI	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	307,000,000	
142	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan modal dan peralatan pengembangan produksi dodol a.n. KUB DODOL PRISMA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	177,500,000	
143	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Modal usaha Industri pengolahan buah-buahan dan umbi a.n. Kel. Usaha IKM KUB MAJU BERSAMA	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	243,000,000	
144	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Dana peralatan a.n. Kel. Usaha Industri Kecil Menengah KRESNA MULTI PRODUK	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	516,600,000	
	JUMLAH			60,374,487,200	

**USULAN HIBAH/BANSOS TAHUN 2016 HASI RESES DPRD
MELALUI RKPD ONLINE**

No.	Urusan Bidang	Program	Kegiatan	Lokasi	Total	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan dalam Negeri; Revitalisasi Pasar Daerah di Kabupaten Indramayu Kec. Jatibarang Kabupaten Indramayu	Kec. Jatibarang Kabupaten Indramayu	31,000,000,000	
2	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengajuan bantuan pengembangan pengrajin kerudung "Ruhama Collection"	Kp. Grogol Rt.01 Rw.06 Ds. Marga asih Kec. Cicalengka Kab. Bandung	75,000,000	
3	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Usaha Penjahit Kelompok usaha Penjahit AR Kp. Cinta RT 09 RW 01 Desa Cintamanik Kec. Karangtengah	Kp. Cinta RT 09 RW 01 Desa Cintamanik Kec. Karangtengah	25,000,000	
4	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Usaha Eceran Gas Elpigi 3 Kg Kelompok Usaha Pengecer Gas 3 Kg At Tujjar Kp. Gunung Cupu Desa Cikarag Kec. Malangbong	Kp. Gunung Cupu Desa Cikarag Kec. Malangbong	25,000,000	
5	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Usaha Jahit Kelompok Usaha Rumah Jahit Hasnaa Jl. Otista depan Kantor PLN Garut Kota Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jl. Otista depan Kantor PLN Garut Kota Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	25,000,000	
6	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Percetakan dan Sablon Panca Art Kp. Sindanganom RT 02 RW 02 Desa Limbangan Tengah Kec. Limbangan Kab. Garut	Kp. Sindanganom RT 02 RW 02 Desa Limbangan Tengah Kec. Limbangan Kab. Garut	25,000,000	
7	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Industri Rumah Tangga Pengolahan Keripik Pisang Kelompok Sakinah Kp.Mekarsari Desa Cihaurkuning Kec. Cisompet Kab. Garut	Kp.Mekarsari Desa Cihaurkuning Kec. Cisompet Kab. Garut	25,000,000	
8	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Usaha Industri Kolang Kaling Kelompok PD Caruluk Tiga Putra Kp. Harapan Mulya RT 05 RW 02 Desa Sukajaya Kec. cisewu Kab. Garut	Kp. Harapan Mulya RT 05 RW 02 Desa Sukajaya Kec. cisewu Kab. Garut	25,000,000	
9	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Usaha Sewa Alat Pesta Kelompok Usaha Ansoruna Kp. Bojong RT 02 RW 08 Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut	Kp. Bojong RT 02 RW 08 Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut	25,000,000	
10	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Usaha Perdagangan Sembako Kelompok Usaha Mawar Kp. Cireunde RT 02 RW 08 Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut	Kp. Cireunde RT 02 RW 08 Desa Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut	25,000,000	
11	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Usaha Makan Olahan Kelompok Usaha Makanan Olahan Tri Bagja Kp. Kiaralawang RT 01 RW 03 Desa Cikedokan Kec. Bayombong Kab. Garut	Kp. Kiaralawang RT 01 RW 03 Desa Cikedokan Kec. Bayombong Kab. Garut	25,000,000	
12	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Kelompok Budidaya Lele Sangkuran Tawakal Jl. Warung Peuteuy Kp. Salagedang Ds. Sukaraja Kec. Banyuresmi Kab. Garut	Jl. Warung Peuteuy Kp. Salagedang Ds. Sukaraja Kec. Banyuresmi Kab. Garut	100,000,000	
13	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Usaha Jual Beli Domba KUBE Gemilang Kp. Patrol RT 01 RW 02 Desa Margamulya Kec. Cikajang Kab. Garut	Kp. Patrol RT 01 RW 02 Desa Margamulya Kec. Cikajang Kab. Garut	20,000,000	

1	2	3	4	5	6	7
14	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Dana KUKM Kelompok Usaha Kecil dan Menengah Batu Akik Barokah Kp. Parabon Desa Sukaresmi Kec. Sukaresmi Kab. Garut	Kp. Parabon Desa Sukaresmi Kec. Sukaresmi Kab. Garut	20,000,000	
15	Perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Bantuan Modal Usaha Produsen Sendal Florida Kube Florida Jl. Gn. Sabeulah Gg. H. Azhari No. 88 Kel. Tawang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya	Jl. Gn. Sabeulah Gg. H. Azhari No. 88 Kel. Tawang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya	30,000,000	
16	Perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Bantuan Modal Usaha Perdagangan Sembako Kube Sakinah Kp. Sirnagalih Kel. Setianegara kec. Indihiang Kota Tasikmalaya	Kp. Sirnagalih Kel. Setianegara kec. Indihiang Kota Tasikmalaya	30,000,000	
17	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Modal Pengembangan Usaha Meubeul Kube Sejahtera Kp. Negla Kaler Kel. Setianegara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	Kp. Negla Kaler Kel. Setianegara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya	30,000,000	
18	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Modal Usaha Pengrajin Meubeler Kelompok Usaha Pengrajin Meubeler Masagi Jl. Pataruman 14 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jl. Pataruman 14 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	25,000,000	
19	Perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;	Bantuan Modal Usaha Konter HP Kelompok Usaha MeGah Abadi Kp. cibulakan Desa Cinta Kec. Karangtengah Kab. Garut	Kp. cibulakan Desa Cinta Kec. Karangtengah Kab. Garut	25,000,000	
20	Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Bantuan Modal Jasa Warnet Kelompok Mandiri.Net Kp. Warung Tanjung RT 02 RW Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut	Kp. Warung Tanjung RT 02 RW Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut	25,000,000	
21	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Usaha Jual Beli HP, Pulsa dan Pembuatan Keripik Singkong, Wajit dan Tanginang Kelompok Ma'ruful Hidayah Kp. B arukai RT 01 RW 04 Desa Cegedug kec. Cigedug Kab. Garut	Kp. B arukai RT 01 RW 04 Desa Cegedug kec. Cigedug Kab. Garut	25,000,000	
22	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Pengembangan Usaha Konveksi KUBE Konveksi Anugerah Kp. CIbojong Desa Balewangi Kec. Cisarupan Kab. Garut	Kp. CIbojong Desa Balewangi Kec. Cisarupan Kab. Garut	25,000,000	
23	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Usaha Warung Kelontongan Ulfatul Mubarakah Kp. Leumur Jambu Desa Sukakarya Kec. Banyuresmi Kab. Garut	Kp. Leumur Jambu Desa Sukakarya Kec. Banyuresmi Kab. Garut	25,000,000	
24	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Usaha Kerajinan Cincin PD. Galuh Kp. Pataruman Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Kp. Pataruman Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	25,000,000	
25	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Usaha Warung Makanan Kelompok Warung Makan Syukron Kp. Kostarea 2 Desa Mekarlayu Kec. Sukawening Kab. Garut	Kp. Kostarea 2 Desa Mekarlayu Kec. Sukawening Kab. Garut	25,000,000	
26	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Permohonan Bantuan Perkuatan Modal untuk Pengembangan Usaha Makanan Rempeyek Kelompok Perempuan EKA TUNGGAL Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg	Jl. Siliwangi, Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kab. Majalengka CP. 085224558131	20,000,000	
27	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Permohonan Bantuan Perkuatan Modal Untuk Pengembangan Usha Pedagang Kecil, Kelompok Perempuan MITRA USAHA Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg	Blok Pari Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Majalengka 45464 Cp. 08531637044	20,000,000	
28	Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Permohonan Bantuan dana Kelompok wanita Pengrajin Opak dan Rangginang SRI TANJUNG Desa Linggajaya Kecamatan Cisit	Dusun Bakom Desa Linggajaya Kecamatan Cisit CP. kab. Sumedang 085322605471	20,000,000	

1	2	3	4	5	6	7
29	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	Permohonan Bantuan Perkuatan Modal untuk Pengembangan Usaha Makanan Rempeyek Kelompok Perempuan EKA TUNGGAL	Jl. Siliwangi, Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Cp. 085224558131	20,000,000	
30	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	Permohonan Bantuan Perkuatan Modal Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kecil, Kelompok Perempuan MITRA USAHA	Blok Pari Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Majalengka 45464 Cp. 08531637044	20,000,000	
31	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	Permohonan Bantuan Dana Untuk Usaha Steam Motor (Kube Steam Motor AP), Jl. Raya Bandung Rawa Bango Ds. Bojong Kec. Karangtengah	Jl. Raya Bandung Rawa Bango Kec. Karangtengah	30,000,000	
32	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Permohonan Bantuan Dana Untuk Pengembangan Usaha Sapu Ijuk (Kube RN), Kp. Cageundang RT. 04/04 Ds. Nagrak Kec. Cianjur Kab. Cianjur	Kp. Cageundang RT. 04/04 Ds. Nagrak Kec. Cianjur	100,000,000	
33	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	PERMOHONAN BANTUAN MODAL USAHA KELOMPOK USAHA KREATIFITAS MUDA MANDIRI Kp. Balakasap Rt.04 Rw.03 Ds. Pataruman Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat	KP.BALAKASAP rT04 rW 03 DESA PATARUMAN KEC.CIHAMPLAS	40,000,000	
34	Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	BANTUAN DANA KELOMPOK USAHA BERSAMA DEWI SHINTA USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM, DUSUN CIBUNTU RT 26 RW 10 DESA KEDUNGWULUH KECAMATAN PADAHERANG	DUSUN CIBUNTU RT 26 RW 10 DESA KEDUNGWULUH KECAMATAN PADAHERANG	25,000,000	
35	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	PENGADAAN PERALATAN KONVEKSI RUMAHAN KUK MEKAR - LINGK. KARANG RT.004/ RW.029 KELURAHAN-KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS	LINGK. KARANG RT.004/ RW.029 KELURAHAN-KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS	25,000,000	
36	Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	PERMOHONAN BANTUAN DANA KELOMPOK USAHA KECIL (KUK) KURNIA - DSN. BAREGBEG RT.004/RW.006 DESA BAREGBEG KEC. BAREGBEG	DSN. BAREGBEG RT.004/RW.006 DESA BAREGBEG KEC. BAREGBEG	25,000,000	
37	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bantuan Mesin/Peralatan Penumbuhan Industri Konveksi KUBE Jaya Mandiri	Desa Ciranca Kecamatan Malausma	25,000,000	
38	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	Pengadaan bahan Produksi Kerupuk - KUBE KERUPUK SANGGRAY Kp. Karangsambung RT 01/01 Ds. Pasirbungur Kec. Purwadadi	Kp. Karangsambung RT 01/01 Ds. Pasirbungur Kec. Purwadadi Cp ; 082318853372	30,000,000	
39	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	Pengembangan Usaha Kecil - KELOMPOK PEDAGANG PASAR MALAM "SAWARGI" Tambakdahan Kec. Tambakdahan Kab. Subang	Tambakdahan Kec. Tambakdahan Kab. Subang CP; 082119593545	32,500,000	
40	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Usaha perhiasan dan aksesoris olek kelompok Tiara Indah desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Ciamis	dusun ciherang rt 06/02 desa ciherang kec. banjarsari ciamis	30,000,000	
41	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	PENGEMBANGAN USAHA KONVEKSI TAS FADILAH jl. Patriot 05/06 Kel. Sukagali Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	JL.PATRIOT 05/06 KEL.SUKAGALIH KEC.TAROGONG KIDUL	50,000,000	

1	2	3	4	5	6	7
42	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	permohonan bantuan hibah modal untuk pengembangan usaha konveksi "ceria" Kp. nagrog desa sindanggalih kec.karangpawitan Kab. Garut	kp. nagrog desa sindanggalih kecamatan karangpawitan	40,000,000	
43	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	Proposal Permohonan Bantuan Modal KUKM KONVEKSI PUTRA PAKEMITAN Kp. Pakemitan RT 02/06 Desa Mandalawangi Kec. Cipatat Kabupaten Bandung Barat	Kp. Pakemitan RT 02/06 Desa Mandalawangi Kec. Cipatat	25,000,000	
	Jumlah				32,307,500,006	

**REKAPITULASI REALISASI RETRIBUSI
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2014**

No	UPTD/Kabupaten/Kota	Target Retribusi	Realisasi Retribusi
1	Balai Kemetrolagian Bogor	1,800,000,000	1,903,953,800
2	Balai Kemetrolagian Bandung	1,400,000,000	1,514,723,500
3	Balai Kemetrolagian Cirebon	630,000,000	643,732,900
4	Balai Kemetrolagian Karawang	9,700,000,000	11,084,519,700
5	Balai Kemetrolagian Tasikmalaya	470,000,000	480,785,900
6	Balai Pengembangan Perindustrian	500,000,000	540,985,100
	Jumlah	14,500,000,000	16,168,700,900
	Prosentase Pencapaian Target		111.51%